



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip sejak penciptaan, penggunaan, penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE
KLASIFIKASI ARSIP DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
9. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
10. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.

11. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
12. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
13. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan kode klasifikasi arsip di Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa dalam lingkup wilayah Administrasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis di Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan klasifikasi arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa kode dalam bentuk angka (*numeric*) yang disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan tugas Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2005 Nomor 34 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Oktober 2018
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 42
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

1. Klasifikasi arsip terbentuk dalam suatu format daftar jenis-jenis fungsi yang merupakan penjabaran dari fungsi dan tugas yang diemban oleh pencipta arsip baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif.
2. Kegiatan substantif adalah kegiatan yang menyangkut fungsi dan tugas pokok organisasi yang bersangkutan dan bersifat operasional. Kegiatan substantif ini membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan kegiatan fasilitatif adalah kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas pokok dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan suatu organisasi.
3. Klasifikasi arsip digunakan sebagai pedoman untuk menata fisik dan informasi arsip sehingga mampu merekam dan merekonstruksi kegiatan secara utuh dan faktual dari pelaksanaan kegiatan organisasi.
4. Klasifikasi dirinci secara desimal dengan mempergunakan tiga angka dasar. Sesuai dengan sifat desimal, arsip dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) pokok masalah, diberi kode 000 s.d. 900.
5. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus, yang dijabarkan dari pokok masalah ke sub masalah sampai ke sub-sub masalah, dengan penulisan klasifikasi sebagai berikut:

145

100: Pokok Masalah tentang PEMERINTAHAN
140 : Sub Masalah tentang PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
145: Sub-Sub Masalah tentang Administrasi Desa dan Kelurahan

6. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah fasilitatif dan substantif Perangkat Daerah, adalah :

000 UMUM

- 010 URUSAN DALAM
- 020 BARANG DAN JASA
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- 050 PERENCANAAN DAN EVALUASI
- 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 080 KONFERENSI/RAPAT KOORDINASI
- 090 PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

- 110 *PEMERINTAHAN PUSAT*
- 120 *PEMERINTAHAN PROVINSI*
- 130 PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
- 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- 150 *LEGISLATIF MPR / DPR*
- 160 *DPRD PROVINSI*
- 170 *DPRD KABUPATEN/KOTA*
- 180 HUKUM
- 190 *HUBUNGAN LUAR NEGERI*

200 POLITIK

- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU/PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 310 *PERTAHANAN*
- 320 *KEMILITERAN/TNI*
- 330 KEAMANAN
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN

380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

410 PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN
420 PENDIDIKAN
426 KEOLAHRAGAAN
427 KEPEMUDAAN
430 KEBUDAYAAN
440 KESEHATAN
445 RSU, RSJ, RS KHUSUS
450 AGAMA
460 SOSIAL
470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
475 TRANSMIGRASI
476 KELUARGA BERENCANA
480 MEDIA MASSA

500 PEREKONOMIAN

510 PERDAGANGAN
518 KOPERASI DAN UMKM
520 PERTANIAN
523 PERIKANAN DAN *KELAUTAN*
524 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
525 PERKEBUNAN
526 KETAHANAN PANGAN
530 PERINDUSTRIAN
540 *ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL*
550 PERHUBUNGAN
554 *POS*
555 *TELEKOMUNIKASI*
556 PARIWISATA DAN REKREASI
557 *METEOROLOGI*
560 TENAGA KERJA
570 PENANAMAN MODAL
580 PERBANKAN MONETER
590 *AGRARIA*

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

610 PENGAIRAN

620 JALAN

630 JEMBATAN

640 BANGUNAN

650 TATA RUANG KOTA

660 TATA LINGKUNGAN

670 KETENAGAAN

690 AIR MINUM

700 PENGAWASAN

710 BIDANG PEMERINTAHAN

720 BIDANG POLITIK

730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

750 BIDANG PEREKONOMIAN

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

790 BIDANG KEUANGAN

800 KEPEGAWAIAN

810 PENGADAAN

820 MUTASI

830 KEDUDUKAN

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

850 CUTI

860 PENILAIAN

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

880 PEMBERHENTIAN

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

900 KEUANGAN

910 ANGGARAN

920 VERIFIKASI

930 PEMBUKUAN (AKUNTANSI)

940 PERBENDAHARAAN

950 PEMBINAAN PERBENDAHARAAN

960 PENGELOLAAN KAS DAERAH

970 PENDAPATAN

II.	RINCIAN	
NO	KODE	KLASIFIKASI
1.	000	UMUM
	001	Lambang
	001.1	Garuda
	001.2	Bendera Kebangsaan
	001.3	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
	002	Tanda Kehormatan/ Penghargaan
	002.1	Bintang
	002.2	Satyalencana
	002.3	Satyakarya Nugraha
	002.4	Penghargaan secara adat
	002.5	Penghargaan lainnya (Adipura, Kalpataru, dsb.)
	003	Hari Raya/ Hari Besar
	003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hardiknas, dsb.)
	003.2	Keagamaan
	003.3	Hari Ulang Tahun / Hari Jadi (Kabupaten, Kota, Provinsi)
	004	Ucapan
	004.1	Ucapan terima kasih
	004.2	Ucapan selamat
	004.3	Ucapan mohon diri
	004.4	Ucapan belasungkawa
	004.5	Ucapan lainnya
	005	Undangan
	006	Tanda Jabatan
	006.1	Pamong Praja
	006.2	Pejabat lainnya
	007	Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah
	010	URUSAN DALAM
	011	Gedung Kantor
	011.1	Instalasi Listrik
	011.2	Telepon
	011.3	Internet
	011.4	Air Minum
	011.5	Hidrant

	011.6	Alarm
	011.7	Drainage
	012	Rumah Dinas
	012.1	Tanah untuk Rumah Dinas
	012.2	Perabotan
	013	Persinggahan / akomodasi
	013.1	Mess
	013.2	Wisma
	013.3	Apartemen, Rumah Susun
	014	Pengurusan kendaraan dinas
	015	Penerangan Listrik / Jasa Listrik
	016	Peminjaman sarana prasarana kantor
	017	Keamanan / Tata tertib kantor
	018	Kebersihan Kantor
	019	Protokol
	019.1	Upacara Bendera
	019.2	Tata tempat (Pemasangan Gambar Presiden / Wakil Presiden)
	019.3	Audiensi
	019.4	Penerimaan Tamu
	019.5	Kerjasama
	019.6	Bandir/ Umbul-umbul
	020	BARANG DAN JASA
	021	Penawaran
	022.1	Penawaran barang
	022.2	Penawaran jasa
	022	Pesanan
	022.1	Alat Tulis
	022.2	Mesin Kantor
	022.3	Perabot Kantor
	022.4	Peralatan lainnya
	023	Jasa
	024	Alat Angkutan
	025	Rencana Kebutuhan Barang
	026	Sensus Barang
	027	Pengadaan
	027.1	Penunjukan Langsung
	027.2	Lelang
	027.3	Barang Inventaris
	027.4	Barang non Inventaris

	028	Inventaris
	028.1	Pemeliharaan
	028.2	Mutasi
	028.3	Penghapusan
	029	Pelaporan
	030	KEKAYAAN DAERAH
	031	Barang-barang tidak bergerak (tanah, kebun, dll.)
	032	Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll.)
	033	Tanaman
	034	Alat-alat berat
	035	Hewan
	036	Barang persediaan dalam gudang
	037	Alat pengangkut (darat, laut, udara)
	038	Peralatan kantor/ pabrik
	039	Peralatan kesehatan (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
	040	PERPUSTAKAAN/ DOKUMENTASI/ KEARSIPAN/ SANDI
	041	Perpustakaan
	041.1	Pengolahan
	041.2	Layanan / sirkulasi
	041.21	Keanggotaan
	041.2	Peminjaman dan pengembalian
	041.3	Deposit
	041.4	Pemeliharaan, pelestarian/ alih media bahan pustaka
	041.5	Pengadaan Bahan Pustaka
	041.6	Pembinaan perpustakaan
	041.7	Publikasi / promosi perpustakaan
	041.8	Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, Sekolah, Perguruan Tinggi, Keliling, Masyarakat)
	041.9	Kemitraan, Kerjasama antar perpustakaan
	042	Dokumentasi
	045	Kearsipan
		Kebijakan, penyusunan NSPK
	045.1	Pengelolaan arsip dinamis
	045.11	Klasifikasi Arsip
	045.12	Penataan berkas
	045.2	Pengelolaan arsip statis
	045.21	Akuisisi arsip
	045.22	Penelusuran arsip statis
	045.23	Akses arsip

	045.3	Layanan arsip
	045.4	Penyusutan Arsip
	045.41	Penilaian Arsip
	045.42	Pemindahan Arsip
	045.43	Penyerahan Arsip
	045.44	Pemusnahan Arsip
	045.45	Berita Acara
	045.46	Daftar Arsip
	045.5	Pembinaan Kearsipan
	045.51	Bimbingan Teknis
	045.52	Monitoring, evaluasi, pengawasan, supervisi
	045.6	Pemeliharaan, perawatan, pelestarian arsip
	045.61	Fumigasi, termyte control
	045.62	Laminasi, encapsulasi
	045.7	Alih media
	045.8	Pengembangan Sistem Kearsipan
	045.9	Pemasyarakatan Kearsipan
	046	Data Elektronik
	047	Sandi
	050	PERENCANAANDAN EVALUASI
		meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar kementerian, Musrenbangnas, Musrenbangdes
	050.1	RPJM
	050.11	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
	051	RENSTRA (Rencana Strategis)
	051.1	RENSTRA Perangkat Paerah
	052	Program daerah
	052.1	Rencana Kerja Perangkat Paerah
	052.2	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
	052.3	RKO (Rencana Kerja Operasioal)
	052.4	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
	053	Evaluasi
	053.1	Evaluasi Rencana Strategis
	053.2	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
	053.3	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN
	061	Organisasi Pemerintah
	061.1	Susunan organisasi dan tata kerja
	061.2	Tata tertib kantor, jam kerja

	062	Organisasi Badan Non Pemerintah
	063	Organisasi Badan Internasional
	064	Organisasi Semi Pemerintah
	065	Ketatalaksanaan
	065.1	Tata naskah dinas
	065.2	Stempel dinas, stempel jabatan
	065.3	Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah
	065.4	Alamat kantor, alamat pejabat
	065.5	Ketentuan pakaian dinas dan atribut
	066	Tata Hubungan Kerja
	066.1	Telaah Tata Hubungan
	066.2	Penyusunan
	066.3	Bimbingan
	067	Standar Pelayanan (SPM, SOP).
	067.1	Telaah
	067.2	Penyusunan
	067.3	Bimbingan
	068	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
	070	<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>
	071	Riset
		meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
	072	Pengembangan
	072.1	Krenova (kreativitas dan inovasi masyarakat)
	072.2	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster kabupaten /kota, desa inovatif)
	072.3	Pameran produk inovasi/ristek
	072.4	Hak kekayaan intelektual (HAKI)
	072.5	BTC (Bisnis Teknologi Center)
	073	Kajian
	073.1	Kajian strategis/diskusi/Forum Group Discussion (FGD)
	073.2	Seminar/diseminasi/sosialisasi hasil penelitian
	073.3	Workshop/lokakarya
	073.4	Rapat koordinasi/rapat teknis
	074	Kerjasama penelitian
	074.1	Instansi pemerintah pusat/daerah
	074.2	Perguruan tinggi negeri/swasta
	074.3	Lembaga swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat
	075	Publikasi Ilmiah
	076	Jaringan Penelitian dan Pengembangan.

	080	KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI
	081	Gubernur
	082	Bupati / Walikota
	083	Komponen eselon lainnya (termasuk pimpinan Perangkat Daerah)
	084	Instansi lainnya (diluar Kemendagri)
	085	Internasional di dalam negeri
	086	Konferensi perangkat desa, sekretaris desa
	090	PERJALANAN DINAS
	091	Perjalanan presiden/wakil presiden ke daerah
	092	Perjalanan menteri ke daerah
	093	Perjalanan pejabat tinggi (pejabat eselon I)
	094	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas
	095	Perjalanan presiden / wakil presiden ke luar negeri
	096	Perjalanan menteri ke luar negeri
	097	Perjalanan tamu asing ke daerah
	098	Perjalanan pejabat tinggi ke luar negeri
	099	Perjalanan pegawai ke luar negeri

NO.	KODE	KLASIFIKASI
2.	100	PEMERINTAHAN
	110	PEMERINTAHAN PUSAT
	111	Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
	111.1	Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
	111.2	Amanat Presiden/ amanat kenegaraan
	112	Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan serah terima jabatan
	113	Susunan Kabinet
	113.1	Reshuffle
	113.2	Penunjukan Menteri adm interim
	113.3	Sidang Kabinet, Sidang Dewan Stabilitas Ekonomi (<i>lihat 500.1</i>)
	114	Kementerian Dalam Negeri
	114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
	115	Kementerian Lainnya
	116	Lembaga Tinggi Negara
	117	Lembaga Non Kementerian
	118	Otonomi Daerah
	119	Kerjasama antar Kementerian
	120	PEMERINTAHAN PROVINSI
	120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
	120.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
	120.03	Monografi
	120.1	Koordinasi
	120.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
	120.12	Instansi Vertikal
	120.13	Kerjasama antar provinsi/daerah, dan luar negeri
	121	Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
	122	Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
	123	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
	124	Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi : Muspida
	125	Pembentukan/pemekaran
	125.1	Pembentukan daerah otonom
	125.2	Pembentukan wilayah
	125.3	Perubahan batas wilayah

	125.4	Pemekaran wilayah
	125.5	Permasalahan batas wilayah
	125.6	Pemindahan ibukota provinsi
	125.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
	126	Pembagian wilayah
	127	Penyerahan urusan
	130	PEMERINTAHAN KABUPATEN
	131	Bupati, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
	132	Wakil Bupati, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
	133	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
	134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah (FKPD)
	135	Kebijakan pemerintahan kabupaten/kota
	135.1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
	135.2	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati(LKPJ)
	135.3	Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati /Walikota (AMJ)
	136	Koordinasi
	136.1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
	136.2	Instansi vertikal
	136.3	Kerjasama antar provinsi/daerah, dan luar negeri (sister city)
	137	Kewilayahan
	137.1	Pembentukan daerah otonom
	137.2	Pembentukan/pembagian wilayah
	137.3	Perubahan batas wilayah
	137.4	Pemekaran wilayah
	137.5	Permasalahan batas wilayah
	137.6	Pemindahan ibukota kabupaten/kota
	137.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
	138	Penyerahan urusan
	139	Pemerintah Kecamatan
	139.1	Pembentukan Kecamatan
	139.2	Pemekaran Kecamatan
	139.3	Perluasan/ perubahan batas wilayah kecamatan
	139.4	Pemindahan Ibukota Kecamatan
	139.5	Laporan Kecamatan

	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
	141	Aparatur Desa
		meliputi : pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan, dsb.
	141.1	Penghasilan dan tunjangan
	141.2	Kesejahteraan selain penghasilan dan tunjangan (hak cuti, jaminan kesehatan, penerimaan lainnya)
	141.3	Perlindungan hukum terhadap tupoksi
	142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
	143	Kekayaan desa : bondo desa, tanah bengkok, tanah kas desa, dll
	144	Lembaga Tingkat Desa : BPD, LPMD, LPMK, dll.
	145	Administrasi desa / kelurahan :
	145.1	Profil desa, monografi, rupa bumi.
	145.2	Renstra Pempdes / Kelurahan
	145.3	RPJM Desa
	145.4	RKP Desa
	145.5	LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)
	146	Kewilayahan
	146.1	Pembentukan desa / kelurahan
	146.2	Pemekaran desa / kelurahan
	146.3	Perubahan dan perluasan batas wilayah desa/kelurahan
	146.4	Perubahan nama desa / kelurahan
	146.5	Permasalahan batas desa / kelurahan
	146.6	Penyatuan desa / kelurahan
	146.7	Penghapusan desa / kelurahan
	147	Dusun, RT, RW
	148	Kader Desa
	150	LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
	151	Keanggotaan MPR
	151.1	Pencalonan
	151.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
	151.3	Pemberhentian
	151.31	Recall
	151.32	Meninggal
	151.4	Pelanggaran
	151.5	Pergantian antar waktu
	152	Keanggotaan DPR
	152.1	Pencalonan
	152.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah

	152.3	Pemberhentian
	152.31	Recall
	152.32	Meninggal
	152.4	Pelanggaran
	152.5	Pergantian antar waktu
	153	Kenggotaan DPD
	153.1	Pencalonan
	153.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
	154	Persidangan
	155	Kesejahteraan
	155.1	Keuangan
	155.2	Penghargaan
	156	Hak
	157	Jawaban Pemerintah
	158	Kunjungan lapangan, peninjauan
	159	Kunjungan kerja, study banding, konsultasi
	160	DPRD PROVINSI
	161	Keanggotaan
	161.1	Pencalonan
	161.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
	161.3	Pelanggaran
	161.4	Pemberhentian antar waktu
	161.41	Meninggal dunia
	161.42	Mengundurkan diri
	161.43	Diberhentikan
	161.5	Alat kelengkapan dewan
	161.51	Pimpinan
	161.52	Badan Musyawarah
	161.53	Komisi
	161.54	Badan Legislasi Daerah
	161.55	Badan Anggaran
	161.56	Badan Kehormatan
	161.57	Alat kelengkapan lain (Pansus)
	162	Persidangan
	162.1	Rapat-rapat
	162.11	Rapat paripurna, rapat paripurna istimewa
	162.12	Rapat pimpinan DPRD
	162.13	Rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, legislasi, rapat badan kehormatan
	162.14	Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat konsultasi
	162.15	Rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat pemandangan umum
	162.16	Rapat fraksi
	162.2	Fraksi

	162.3	Tata tertib
	162.4	Kode etik
	162.5	Reses
	162.6	Peninjauan, kunjungan lapangan
	162.7	Kunjungan kerja, study banding, konsultasi
	163	Kesejahteraan
	163.1	Keuangan
	163.2	Penghargaan
	164	Hak
	165	Sekretaris DPRD Provinsi
	170	DPRD KABUPATEN / KOTA
	171	Keanggotaan
	171.1	Pencalonan
	171.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
	171.3	Pelanggaran
	171.4	Pemberhentian antar waktu
	171.41	Meninggal dunia
	171.42	Mengundurkan diri
	171.43	Diberhentikan
	171.5	Alat kelengkapan dewan
	171.51	Pimpinan
	171.52	Badan Musyawarah
	171.53	Komisi
	171.54	Badan Legislasi Daerah
	171.55	Badan Anggaran
	171.56	Badan Kehormatan
	171.57	Alat kelengkapan lain (Pansus)
	172	Persidangan
	172.1	Rapat-rapat
	172.11	Rapat paripurna, rapat paripurna istimewa
	172.12	Rapat pimpinan DPRD
	172.13	Rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, legislasi, rapat badan kehormatan
	172.14	Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat konsultasi
	172.15	Rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat pemandangan umum
	172.16	Rapat fraksi
	172.2	Fraksi
	172.3	Tata tertib
	172.4	Kode etik
	172.5	Reses
	172.6	Peninjauan, kunjungan lapangan
	172.7	Kunjungan kerja, study banding, konsultasi
	173	Kesejahteraan

	173.1	Keuangan
	173.2	Penghargaan
	174	Hak
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
	180	HUKUM
	180.1	Konstitusi
	180.11	Dasar Negara
	180.12	Undang-Undang Dasar
	180.13	Undang-Undang
	180.14	<i>Peraturan pemerintah</i>
	180.15	Keputusan / peraturan / instruksi Presiden
	180.16	Keputusan / peraturan / instruksi Menteri
	180.17	Perundangan tingkat provinsi meliputi : peraturan daerah, keputusan/peraturan/instruksi gubernur
	180.18	Perundangan tingkat kabupaten meliputi : Peraturan Daerah, Keputusan Bupati /Peraturan Bupati.
	180.19	Perundangan tingkat desa meliputi : peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa
	180.2	Tap MPR
	180.3	Konvensi
	181	Perdata
	181.1	Tanah
	181.2	Rumah
	181.3	Utang/ piutang
	181.31	Gadai
	181.32	Hipotik
	181.4	Notariat
	182	Pidana
	182.1	Tindak Pidana Umum
	182.2	Tindak Pidana Khusus
	183	Peradilan
	183.1	Jenis-jenis peradilan
	183.11	Peradilan Umum
	183.12	Peradilan Agama Islam
	183.13	Peradilan Negeri
	183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
	183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi
	183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
	183.17	Mahkamah Konstitusi
	183.18	Komisi Yudisial

	183.19	Ombustmen
	183.2	Upaya Hukum
	183.21	Banding
	183.22	Kasasi
	183.23	<i>Derden Verzet</i>
	183.24	Peninjauan Kembali
	183.3	Eksekusi
	183.4	Pembinaan Hukum
	183.41	Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
	183.5	Bantuan Hukum
	183.51	Lembaga Bantuan Hukum
	184	Hukum Internasional
	185	Imigrasi
	186	Kepenjaraan
	187	Kejaksaan
	187.1	Penuntutan Umum
	187.1	Penuntutan Khusus
	188	Hukum Adat
	188.1	Tokoh adat / masyarakat
	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
	191	Perwakilan Asing
	192	Tamu Negara
	193	Kerjasama dengan Negara Asing
	193.1	Kerjasama Bilateral
	193.2	Kerjasama Multilateral
	194	Perwakilan R.I di luar negeri
	195	PBB
	196	Laporan Luar Negeri

NO	KODE	KLASIFIKASI
3.	200	POLITIK
	201	Perencanaan dan Program Pembinaan politik dalam negeri
	202	Pembinaan dan pemantapan ideologi negara
	203	Hasil evaluasi dan pengawasan pembinaan mengenai Ipoleksosbud, Kamtibmas
	210	KEPARTAIAN
	211	Partai Politik (PARPOL)
	211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik

	211.2	Program kerja, data kegiatan partai politik
	211.3	Pembinaan partai politik
	211.4	Hasil munas/ Musda partai politik
	211.5	Struktur/kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan partai politik
	211.6	Data inventaris dan keuangan partai politik
	212	Partai/ organisasi terlarang
	212.1	Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang
	212.2	Daftar dan data pengurus anggota partai/ organisasi terlarang
	212.3	Ijin meninggalkan tempat/ domisili bagi anggota partai/ organisasi terlarang
	212.4	Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang
	212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang
	213	Forum komunikasi lintas antar partai politik
	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	221	Pembentukan organisasi
	221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
	221.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
	221.3	Program kerja organisasi
	221.4	Musyawarah Nasional / Musyawarah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	221.5	Musyawahdesa / musyawarah kelurahan
	222	Pembinaan organisasi
	222.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
	222.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
	223	Pemantauan orang asing dan lembaga asing
	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
	231	Pembentukan organisasi
	231.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
	231.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
	231.3	Program kerja organisasi
	231.4	Munas/ Musda provinsi dan kabupaten/ kota
	232	Pembinaan organisasi
	232.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
	233	Daftar inventaris kekayaan organisasi

	240	ORGANISASI PEMUDA
	241	Pembentukan organisasi
	241.1	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
	241.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
	241.3	Program kerja organisasi
	241.4	Munas/ musda provinsi dan kabupaten/ kota
	242	Pembinaan organisasi
	242.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
	243	Daftar inventaris kekayaan organisasi
	250	ORGANISASI WANITA
	251	Pembentukan organisasi
	251.1	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
	251.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
	251.3	Program kerja organisasi
	251.4	Munas/ musda provinsi dan kabupaten/ kota
	252	Pembinaan organisasi
	252.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
	253	Daftar inventaris kekayaan organisasi
	260	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN
	261	Pembentukan organisasi
	261.1	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
	261.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
	261.3	Program kerja organisasi
	261.4	Munas/ musda provinsi dan kabupaten/ kota
	262	Pembinaan organisasi
	262.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
	263	Daftar inventaris kekayaan organisasi
	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
	271	Pencalonan
	272	Nomor urut/ tanda gambar
	273	Kampanye
	273.1	Dana kampanye
	274	Petugas pemilu
	275	Pemilih/ daftar pemilih
	276	Sarana (termasuk kotak suara)
	276.1	TPS

	276.2	Kendaraan
	276.3	Surat suara
	276.4	Kotak suara
	277	Pemungutan suara/ perhitungan suara
	278	Hasil Pemilu
	278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
	278.2	Penetapan pemenang pilkada
	279	KPU/ KPUD
	280	PENGAWASAN PEMILU/ PILKADA
	281	Pemantauan
	282	Pelanggaran
	283	Sengketa
	284	Panwaslu
NO	KODE	KLASIFIKASI
4.	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
	300.1	Kebijakan pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
	300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
	300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan / ketertiban umum
	300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
	301	Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum
	302	Pengawasan ketentraman dan ketertiban umum termasuk ketertiban masyarakat
	303	Penegakan pelaksanaan perda dan perbup
	304	Pembinaan/ penyuluhan pelanggaran perda dan perbup
	305	Patroli wilayah
	306	Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu asing
	306.1	Pengamanan
	306.2	Pengawasan
	307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
	310	PERTAHANAN
	311	Darat
	312	Laut
	313	Udara

	314	Ketahanan bangsa
	315	Ketahanan ekonomi
	316	Ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan
	320	<i>KEMILITERAN / TNI</i>
	321	Kekaryaannya TNI
	322	Kemanunggalan TNI dengan rakyat
	330	<i>KEAMANAN</i>
	331	Kepolisian
	331.1	Polisi pamong praja
	331.2	Kerawanan Tibum Transmas
	331.3	Kader Siaga Trantib
	331.4	Minuman Beralkohol
	331.5	Operasi Pekat
	331.6	Kawasan Tertib
	331.7	Peringatan / Teguran Pelanggaran Perijinan
	331.8	Pembongkaran bangunan / menara
	331.9	Penertiban Reklame
	331.10	Pengawasan Perijinan
	331.11	Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakda)
	332	Huru-hara / demonstrasi / unjuk rasa
	333	Senjata api / tajam
	334	Bahan peledak
	335	Perjudian
	336	Surat-surat kaleng
	337	Pengaduan masyarakat
	338	Himbauan/ larangan
	340	<i>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</i>
	340.1	Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Linmas
	341	Pembinaan dan diklat
	341.1	Pengangkatan/ pemberhentian anggota Linmas
	341.2	Pendidikan/ latihan Linmas
	341.3	Pelatihan PAM swakarsa
	341.4	Pendidikan/ latihan MENWA
	342	Pengerahan dan pengendalian Linmas
	343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
	343.1	Pemberian tali asih bagi anggota Linmas
	343.2	Bantuan modal usaha bagi anggota Linmas
	343.3	Santunan uang bagi anggota Linmas
	343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
	344	Data Linmas, MENWA, PAM swakarta

	344.1	Linmas lanjut usia
	345	Orientasi kesadaran bela negara
	346	Kegiatan Linmas
	350	KEJAHATAN
	351	Makar/ pemberontakan/ terorisme
	352	Pembunuhan
	353	Penganiayaan/ pencurian/ perampasan
	354	Subversi/ penyelundupan/ narkoba
	355	Penipuan dan pemalsuan
	356	Korupsi/ penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan
	357	Kekerasan pada perempuan dan anak (termasuk KDRT)
	357.1	Pelaporan
	357.2	Penanganan korban
	358	Kenakalan
	359	Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, bunuh diri dll.)
	360	BENCANA
	361	Pemetaan daerah bencana
	362	Kawasan rawan bencana
	363	Jenis bencana
	363.1	Banjir, tanah longsor
	363.2	Gunung berapi, gempa, tsunami
	363.3	Angin topan
	363.4	Kebakaran
	363.5	Kekeringan
	364	Kesiapsiagaan bencana (meliputi: pelatihan, posko bencana)
	365	Penanggulangan bencana
	365.1	Penanggulangan bencana tanah longsor
	365.2	Penanggulangan bencana banjir
	365.3	Penanggulangan bencana angin topan
	365.4	Penanggulangan bencana gempa bumi
	365.5	Penanggulangan bencana kekeringan
	366	Surat Keputusan, Berita Acara, MoU
	370	KECELAKAAN
	371	Kecelakaan Darat
	372	Kecelakaan Udara
	373	Kecelakaan Laut
	374	Investigasi / penyelidikan kecelakaan
	375	Latihan ketrampilan penanganan kecelakaan
	376	Asuransi kecelakaan
	377	Satkorlak dan Satlak PBP

	380	PENDAMPINGAN REKONSTRUKSI REHABILITASI DAN
	381	Perencanaan
	381.1	Perencanaan teknis
	381.2	Rekomendasi
	382	Bantuan bencana
	383	Penanggulangan bencana dengan pihak lain
	384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
	385	Pusat pengendalian operasional (PUSDALOPS)
	386	Kunjungan lapangan
	387	Relawan
	388	Laporan bencana
	390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
	391	Instansi Pemerintah Pusat
	392	Instansi Pemerintah di daerah
	393	Lembaga Internasional
	394	Lembaga non pemerintah
NO	KODE	KLASIFIKASI
5.	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
	401	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
	410	PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN
	411	Gotong royong
	411.1	Swadaya gotong royong
	411.2	Lembaga Sosial Desa
	411.3	Latihan Kerja Masyarakat
	411.4	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
	411.5	Penyuluhan masyarakat desa
	412	Perekonomian desa/ kelurahan
	412.1	Produksi desa
	412.2	Pembiayaan pembangunan desa
	412.21	Inventarisasi data
	412.22	Pelaksanaan dan perkembangan pembangunan desa
	412.23	Bantuan pembangunan desa
	412.3	Koperasi Desa
	412.4	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
	413	Sarana dan prasarana desa/ kelurahan
	413.1	Pemukiman penduduk
	413.2	Perbaikan kampung
	413.3	Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
	413.4	Sumber daya desa

	414	Pengembangan desa/ kelurahan
	414.1	Pembinaan
	414.2	Perlombaan
	415	Kerjasama
	415.1	Perguruan Tinggi
	415.2	Kementerian / Lembaga Pemerintah
	415.3	Lembaga lainnya
	416	Teknologi Pedesaan
	420	PENDIDIKAN
	420.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk pendidikan (termasuk kejar paket A,B,C, pendidikan keluarga, pendidikan anak putus sekolah)
	420.2	Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme, dsb.
	420.3	Pendidikan kemasyarakatan
	421	Sekolah (termasuk akreditasi, regrouping, perijinan pendirian, ijin operasional lembaga)
	421.1	Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
	421.2	Sekolah Dasar
	421.3	Sekolah Menengah
	421.4	Sekolah Kejuruan
	421.5	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
	421.6	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
	421.7	Pendidikan Luar Sekolah / pemberantasan buta huruf
	421.8	Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
	422	Administrasi sekolah
	422.1	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK (MOS)
	422.2	Kalender pendidikan
	422.3	Uang sekolah
	422.4	Beasiswa dan penghargaan siswa berprestasi
	422.5	Bantuan pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Program Indonesia Pintar (PIP)
	422.6	Ijazah, Sertifikat
	423	Metode belajar
	423.1	Kurikulum
	423.2	Kuliah, Diskusi
	423.3	Ujian, ulangan
	423.4	E-Learning
	423.5	Ceramah, simposium, seminar

	423.6	Karya tulis, karya ilmiah
	423.7	Kuliah lapangan, KKN, magang/ praktek/ PKL/PSG
	423.8	Sistem Informasi Pendidikan
	423.9	Kegiatan pelajar diantaranya orientasi siswa, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olahraga dan sains), pelajar teladan, pertukaran pelajar
	424	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	424.1	Pertukaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keluar Negeri
	424.2	K3S, MGMP, MGPD
	424.3	Sertifikasi guru
	425	Sarana pendidikan
	425.1	Bangunan pendidikan
	425.11	Gedung sekolah
	425.12	Kampus
	425.13	Pusat Kegiatan
	425.14	Perpustakaan
	425.15	Laboratorium
	425.2	Buku
	425.3	Perlengkapan pendidikan
	426	KEOLAHRAGAAN
	426.1	Pembinaan keolahragaan
	426.11	Olahraga Prestasi (Porprov, PON, Kejurnas, Sea Games, Olympiade)
	426.12	Olahraga Pendidikan (POPDA, Porseni, dll)
	426.13	Olahraga rekreasi/ massal (senam, sepeda santai, olahraga tradisional, dll)
	426.14	Iptek dan industri olahraga
	426.2	Kemitraan olahraga
	426.7	Sarana Prasarana Keolahragaan
	427	KEPEMUDAAN
	427.1	Pertukaran pemuda
	427.2	Paskibraka
	427.3	Pemberdayaan pemuda (Karang Taruna)
	427.4	Kemitraan pemuda
	428	Kepramukaan/ kependuan
	429	Sarana prasarana keolahragaan
	430	KEBUDAYAAN
	430.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kebudayaan
	430.2	Pembinaan kebudayaan
	431	Kesenian

431.1	Cabang Kesenian (seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis, dll)
431.2	Sarana Prasarana Kesenian
431.3	Festival, pentas seni
432	Kepurbakalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan kuno (benda, candi, dll)
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Penghayat Kepercayaan
436	Kegiatan adat / tradisi
440	KESEHATAN
440.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan dan pelayanan kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan masyarakat meliputi PKM, pemberdayaan kesehatan masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
441.8	Kesehatan keluarga (termasuk kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja)
441.9	Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, dll.)
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan obat
442.2	Pemeriksaan obat
442.3	Penyimpanan obat
442.4	Distribusi obat
442.5	Pengawasan obat
442.51	Obat generik
442.52	Obat terlarang
442.53	Pemalsuan obat
443	Pemberantasan dan pencegahan penyakit
443.1	Pencegahan penyakit
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS

	443.23	Frambusia
	443.24	T.B.C
	443.25	Kholera
	443.26	SARS, dan jenis penyakit lainnya
	443.3	Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
	443.31	Malaria
	443.32	Dengue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD
	443.33	Filaria
	443.34	Serangga
	443.35	Rabies
	443.36	Antrak
	443.37	Leptosirosis
	443.38	Chikungunya
	443.39	Penyakit lainnya
	443.4	Pemberantasan dan pencegahan penyakit tidak menular
	443.41	A. pektoris
	443.42	IMA (Irama Astcmika Akut)
	443.43	Hipertensi
	443.44	Stroke
	443.45	Diabetes Melitus
	443.46	Pemberantasan dan pencegahan penyakit CA.Serviks
	443.47	Pemberantasan dan pencegahan penyakit CA.Mammae
	443.48	Pemberantasan dan pencegahan penyakit CA.Hepar
	443.49	Pemberantasan dan pencegahan penyakit CA Paru, dan penyakit lainnya
	443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
	443.51	Imunisasi
	443.52	Surveilanse
	443.53	Pestisida
	443.54	Pencemaran udara
	443.55	Jamban keluarga
	443.56	Kesehatan institusi
	443.6	Higiene sanitasi
	443.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasaboga
	443.62	Sarana air minum
	443.63	Pestisida, insektisida
	443.64	Pencemaran
	443.65	Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga

	443.66	Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll
	443.67	Higiene sanitasi CA.Mammae
	443.68	Higiene sanitasi CA.Hepar
	443.69	Higiene sanitasi CA.Paru
	443.7	Kejadian khusus
	443.71	Dekopensatiokordosis (serangan jantung)
	443.72	Asma
	443.73	Psikosis
	443.75	Kecelakaan lalulintas
	443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
	444	Gizi dan pengawasan makanan
	444.1	Kekurangan makanan
	444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi buruk
	444.3	Keracunan makanan
	444.4	Menu makanan rakyat
	444.5	Gondok Endemik (GAKI)
	445	RSU, RSJ, RS Khusus
	445.1	Pelayanan medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
	445.11	Rawat inap
	445.12	Rawat jalan
	445.13	IGD
	445.14	IBS
	445.16	VK (Kamar Bersalin)
	445.17	ICU
	445.18	MCU (Medical Check Up)
	445.2	Penunjang medis
	445.21	Farmasi
	445.22	Rekam medik
	445.23	Radiologi,Fisioterapi
	445.24	Gizi
	445.25	Laboratorium Klinik
	445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
	445.27	Bank Darah Rumah Sakit
	445.3	Penunjang Non Medis
	445.31	IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)
	445.32	IT (Instalasi Teknologi Informatika)
	445.33	ITK (Instalasi Transportasi dan Keamanan)
	445.34	Sanitasi Rumah Sakit
	445.35	CSSD/Laundry

	445.4	Keperawatan
	445.5	Komite
	445.51	Komite Medis
	445.52	Komite Keperawatan
	445.53	Komite Tenaga Penunjang
	445.54	Komite Farmasi dan Terapi
	445.55	Komite Hukum dan Etik
	445.56	Komite Karyawan
	445.6	SPI (Satuan Pengawas Internal)
	445.7	Mutu Rumah Sakit
	445.71	Akreditasi
	445.72	ISO
	445.73	PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
	445.74	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
	445.8	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
	445.9	Promosi layanan kesehatan
	445.91	CSR (Corporate Social Responbility)
	445.92	Komplain Pelanggan
	445.10	Kasus Hukum Rumah Sakit
	446	Tenaga Medis
	446.1	Perencanaan Tenaga Medis
	446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
	446.21	Perijinan untuk Tenaga Medis
	446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
	446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
	446.24	TKHD (Tenaga Kesehatan Haji Daerah)
	446.3	Diklat Tenaga Kesehatan/ Medis
	446.4	Diklat Tenaga Kesehatan/ Para Medis
	446.5	Pendidikan di bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
	447	Peralatan kesehatan
	447.1	Standarisasi
	447.2	Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan
	448	Pengobatan Alternatif
	448.1	Pijat
	448.2	Akupunktur
	448.3	Jamu dan herbal
	449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan (termasuk Polindes dan Forum Kesehatan Desa)
	449.1	Puskesmas dan Puskesmas Keliling
	449.2	Poliklinik, Balai Kesehatan

	449.3	Rumah Bersalin
	449.4	Posyandu
	449.5	Laboratorium Kesehatan
	449.6	Apotik
	449.7	Sanatorium kesehatan
	449.8	Public Safety Center (PSC)
	450	AGAMA
	450.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
	450.2	Bantuan dibidang keagamaan
	451	Islam
	451.1	Peribadatan
	451.11	Sholat
	451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh,
	451.13	Puasa
	451.14	Umroh dan Haji
	451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Mushola, Surau)
	451.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i, Ustad/Ustadzah)
	451.4	Pendidikan Agama
	451.41	Pendidikan Tinggi Agama
	451.42	Menengah, MTs, MA
	451.43	Dasar, Pra Sekolah, Madrasah Ibtidaiyah/MI
	451.44	Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
	451.45	Dakwah (Pengajian, MTQ)
	451.5	Wakaf
	451.6	Mazhab Agama Islam
	451.7	Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat, dll)
	452	Kristen Protestan
	452.1	Peribadatan
	452.2	Rumah Ibadah (Gereja, dll.)
	452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine)
	452.4	Mazhab, aliran
	452.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik
	453	Katolik
	453.1	Peribadatan
	453.2	Rumah Ibadah, (Gereja, Kaple dll)
	453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pastur)
	453.4	Mazhab, aliran
	453.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik

	454	Hindu
	454.1	Peribadatan
	454.2	Rumah Ibadah (Pura, dll)
	454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
	454.4	Mazhab, aliran
	454.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik
	455	Budha
	455.1	Peribadatan
	455.2	Rumah Ibadah, (Candi, Vihara dll)
	455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
	455.4	Mazhab, aliran
	455.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik
	456	Kong Hu Cu
	456.1	Peribadatan
	456.2	Rumah Ibadah, (Klenteng dll)
	456.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
	456.4	Mazhab, aliran
	456.5	Organisasi keagamaan bukan politik
	460	SOSIAL
	461	Rehabilitasi Penyandang Cacat
	461.1	Cacat Ganda
	461.2	Cacat Fisik
	461.3	Cacat Mental
	462	Rehabilitasi Sosial
	462.1	Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan
	462.2	Pengemis
	462.3	Tuna Susila
	462.4	Anak Nakal
	462.5	Tuna Wisma
	463	Kesejahteraan anak dan keluarga
	463.1	Kesejahteraan Anak
	463.11	Pengarusutamaan Hak-Hak Anak (PUHA)
	463.12	Perlindungan Anak
	463.13	Anak Asuh
	463.2	Kualitas Hidup Perempuan
	463.21	Perlindungan Perempuan
	463.22	Ibu teladan
	463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
	464	Keperintisan dan kepahlawanan
	464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan,

		tunjangan pada pahlawan dan jandanya
464.2		Perintis kemerdekaan meliputi pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan
464.3		Cacat Veteran
465		Kesejahteraan Sosial
465.1		Lanjut Usia
465.2		Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
465.3		Masyarakat miskin: Rastra, BLT, dll
465.4		Potensi sumber kesejahteraan sosial (meliputi : Pekerja Sosial Masyarakat / PSM, Penyuluh Sosial, TKSK, Tagana, LKS/Orsos, Saka Bina Sosial, LK3, WKSBM, RSBM).
466		Sumbangan sosial
466.1		Korban bencana
466.11		Jaminan Sosial
466.2		Pencarian dana untuk sumbangan: penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar, dsb
466.3		Panti Asuhan
467		Bimbingan sosial
467.1		Masyarakat suku terasing meliputi: bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), dsb.nya
468		PMI
469		Makam
469.1		Umum
469.2		Pahlawan
469.3		Khusus, keluarga
469.4		Krematorium
470		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
470.1		Kebijakan dan program pemerintah untuk kependudukan
471		Pendaftaran penduduk
471.1		Identitas penduduk
471.11		Biodata
471.12		Kartu Identitas Anak
471.13		Kartu Tanda Penduduk
471.14		Kartu Keluarga
471.2		Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia
471.21		Perpindahan penduduk WNI
471.22		Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.23		Perpindahan penduduk WNA tinggal sementara
471.3		Perpindahan penduduk antar negara

	471.31	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
	471.32	Orang asing tinggal sementara
	471.33	Orang asing tinggal tetap
	471.34	Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
	471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
	471.41	Akibat bencana alam
	471.4	Akibat kerusuhan sosial
	471.4	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
	471.4	Pendaftaran penduduk rentan
	472	Pencatatan sipil
	472.1	Kelahiran kematian dan advokasi
	472.11	Kelahiran
	472.12	Kematian
	472.13	Advokasi
	472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi
	472.21	Perkawinan agama Islam
	472.22	Perkawinan agama non Islam
	472.23	Perceraian agama Islam
	472.24	Perceraian agama non Islam
	472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta
	472.31	Pengangkatan anak/Adopsi
	472.32	Pengakuan anak
	472.33	Pengesahan anak
	472.34	Perubahan akta
	472.35	Pembatalan akta
	472.4	Pencatatan perubahan status perkawinan
	472.5	Pencatatan kewarganegaraan
	472.51	Akibat perkawinan
	472.52	Akibat kelahiran
	472.53	Naturalisasi
	472.54	Perubahan WNA ke WNI
	473	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	473.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	473.2	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
	473.3	Kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
	474	Perkembangan penduduk
	474.1	Pengarahannya kuantitas penduduk
	474.2	Pengembangan kuantitas penduduk
	474.3	Penataan persebaran penduduk

	474.4	Perlindungan dan pemberdayaan penduduk
	474.5	Pengembangan wawasan kependudukan
	475	TRANSMIGRASI
	475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi
	475.11	Informasi potensi penempatan transmigrasi
	475.12	Pemasyarakatan/ Sosialisasi transmigrasi
	475.13	Peran serta pemerintah dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
	475.14	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal
	475.15	Kerjasama di urusan transmigrasi
	475.16	Kepulauan transmigran
	475.2	Pemukiman transmigrasi
	475.21	Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
	475.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
	475.23	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
	475.24	Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman
	475.25	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum/sosial dan jaringan transportasi
	475.26	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
	475.27	Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigran
	475.28	Tata ruang pemukiman transmigran
	475.29	Pembinaan dan pengendalian sarana pemukiman transmigrasi
	475.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan
	475.4	Sarana pemukiman transmigrasi
	475.5	Pemantauan penempatan transmigrasi
	475.6	Penilaian transmigrasi teladan
	476	Keluarga Berencana (meliputi kebijakan dan program KB)
	476.1	Pelayanan KB (termasuk pos KB, alat kontrasepsi, mobil unit keliling, dll)
	476.2	Pembinaan dan penyuluhan KB termasuk penyuluhan lapangan KB (PLKB)
	476.3	Pengembangan kader keluarga berencana dan penggerakan organisasi kemasyarakatan
	476.4	Pembinaan dan penyuluhan KB melalui kelompok KB: Kader KB/ PPKBD dan institusi masyarakat

	480	<i>MEDIA MASSA</i>
	480.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media massa
	481	Media cetak
	481.1	Surat Kabar
	481.2	Majalah
	481.3	Bulletin
	481.4	Jurnal
	481.5	Press Release, Klarifikasi berita
	481.6	Layanan informasi
	481.7	Liputan Media Massa
	482	Media elektronik
	482.1	Radio
	481.2	Televisi
	481.3	Film
	483	Reklame / Periklanan
	483.1	Ketentuan pemasangan
	483.2	Pameran
	484	Kewartawanan/ jurnalistik
	484.1	Pembentukan organisasi profesi
	484.2	Kasus-kasus kewartawanan
	484.3	Penyalahgunaan profesi
	484.4	Bantuan kepada/ dari organisasi profesi wartawan
	484.5	Musyawarah Wartawan Indonesia
	484.6	Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
	484.7	Temu Pers/ Konferensi Pers
	484.8	Pers Tour
	484.9	Kunjungan wartawan asing
	485	Penyuluhan masyarakat
	485.1	Publikasi
	485.2	Pendirian Information Center
	486	Pembinaan bidang informasi dan komunikasi
	486.1	Training Fotografi
	486.2	Training Berita Jurnalistik
	486.3	Bimbingan teknis informasi dan komunikasi
	486.4	Rakorda Informasi dan Komunikasi
	486.5	Rakor pengendalian kegiatan
	486.6	Pengelolaan website pemerintah daerah
	487	Hubungan antar lembaga
	487.1	Non pemerintah
	487.11	Wahana komunikasi masyarakat
	487.12	Lembaga komunikasi masyarakat

	487.2	Lembaga pemerintah
	487.21	Pertemuan kehumasan (Bakohumas/Fokohumas)
	487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
	487.3	Luar negeri
	488	Fasilitasi peningkatan pelayanan informasi
	489	Sistem naskah sosialisasi kegiatan gubernur / bupati
	489.1	Himpunan naskah sambutan, himpunan naskah rubrik, himpunan dialog interaktif
	489.2	Dialog Interaktif
	489.3	Rubrik
	489.4	Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan
NO.	KODE	KLASIFIKASI
6.	500	PEREKONOMIAN
	500.1	Dewan stabilisasi
	501	Pengadaan pangan
	502	Pengadaan sandang
	503	Perizinan pada umumnya (perizinan sesuai bidang, klasifikasikan pada masalahnya).
	504	Sensus Ekonomi
	505	Inflasi Harga
	510	PERDAGANGAN
	510.1	Promosi perdagangan
	510.11	Pekan raya
	510.12	Iklan
	510.13	Pameran
	510.14	Event-event
	510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
	510.2	Pelelangan, distribusi
	510.21	Pemasaran sembako
	510.22	Pemasaran hasil industri
	510.23	Penentuan harga pokok
	510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
	510.31	Rencana dan program kerja
	510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
	510.33	Pelaksanaan Teknis
	510.34	Pemantauan
	510.35	Evaluasi dan Pelaporan
	510.4	Tera
	510.41	Tera Ulang Ukuran
	510.42	Takaran

	510.43	Timbangan dan anak timbangan
	510.44	Kalibrasi
	510.45	Cap tanda Tera
	510.46	Biaya Tera
	510.5	Bantuan Peralatan
	510.51	Proposal
	510.52	Surat Perjanjian/kontrak
	510.53	Serah Terima
	510.6	Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
	510.7	Kemetrologian
	510.71	Standart tingkat tiga
	510.72	Standart Kerja Satuan Ukuran
	510.73	Ukuran Metrologi
	510.731	Peralatan
	510.732	Laboratorium Metrologi
	510.733	Tanki Ukur Mobil
	510.734	Meter Taxi
	510.735	KWH Meter
	510.736	S P B U
	510.737	Potensi UTTP dan P3 UTTP
	510.738	Potensi BDKT
	510.739	Pengawasan UTTP
	510.740	Pengawasan BDKT
	510.741	Penyidikan
	510.742	Sosialisasi Kemetrologian
	510.743	Evaluasi dan Pelaporan Kemetrologian
	511	Pemasaran
	511.1	Sembilan bahan pokok : beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, gula dan sebagainya
	511.2	P a s a r
	511.21	Surat Penempatan Pedagang (SPP)
	511.22	Surat Perjanjian
	511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
	511.4	Pusat perbelanjaan
	512	Ekspor
	512.1	Ekspor Hasil Industri
	512.2	Ijin Ekspor
	512.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri
	512.4	Managemen Perdagangan Internasional
	512.5	Ekspor Hasil Industri

	512.51	Kebijakan
	512.52	Pemasaran
	512.6	Pemberitahuan Ekspor Barang
	512.7	Pengawasan Mutu Barang
	512.8	Eksportir Terdaftar
	512.9	Evaluasi dan Pelaporan
	513	Impor
	513.1	Ijin Impor
	513.11	Pemberian Ijin
	513.12	Pengendalian Ijin
	513.2	Standar Mata Dagang Impor
	513.3	Managemen Perdagangan Internasional
	513.4	Kegiatan Impor
	513.41	Pembinaan Impor
	513.42	Pengendalian Impor
	513.43	Pemantauan Impor
	513.5	Faktor-faktor Pendukung
	513.6	Pengawasan Mutu Barang Impor
	513.7	Penyaluran Kegiatan Impor
	513.71	Bahan Konsumsi
	513.72	Bahan Baku
	513.73	Bahan Penolong
	513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor
	514	Perdagangan antar pulau
	514.1	Kerjasama Bahan Baku
	514.2	Industri Pemasaran
	514.3	Kontrak
	515	Perdagangan Luar Negeri
	515.1	Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri
	515.11	Promosi dan Informasi
	515.12	Pameran
	515.13	Kerjasama
	517	Aneka Usaha perdagangan
	518	KOPERASI DAN UMKM
	518.1	Bina Usaha Koperasi
	518.11	Permodalan Koperasi
	518.12	Distribusi dan Jasa Koperasi
	518.2	Bina Lembaga Koperasi
	518.21	Organisasi Koperasi
	518.211	Anggaran Dasar, Anggaran Tumah Tangga, Akte

		Pendirian
	518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
	518.213	Penyelesaian perselisihan / persengketaan
	518.214	Keragaman Koperasi
	518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
	518.221	Rapat Anggota Tahunan
	518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
	518.223	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi
	518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
	518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
	518.25	Pengawasan Koperasi
	518.26	Penyuluhan Koperasi
	518.27	Petugas penyuluh koperasi lapangan
	518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	518.31	Pembinaan UMKM
	518.32	Pengawasan UMKM
	520	<i>PERTANIAN</i> meliputi : kebijakan dan program bidang pertanian)
	521	Tanaman pangan
	521.1	Rencana dan Program
	521.2	Produksi
	521.21	Padi
	521.22	Palawija
	521.23	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)
	521.3	Sarana Usaha Pertanian
	521.31	Peralatan
	521.32	Pembenihan, pembibitan
	521.33	Pupuk
	521.34	Irigasi
	521.35	Rehabilitasi lahan pertanian (termasuk lahan kritis)
	521.4	Perlindungan tanaman (termasuk pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan)
	521.5	Pengusaha, petani
	521.6	Pemasaran dan promosi pertanian
	521.7	Pengembangan SDM pertanian
	522	Kehutanan
	522.1	Perencanaan Hutan
	522.2	Tata Guna Hutan
	522.3	Pengusahaan Hutan
	522.4	Sarana Usaha

	522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
	522.6	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
	522.7	Hutan Produksi
	522.8	Kawasan Lindung
	523	PERIKANAN DAN KELAUTAN
	523.1	Rencana dan Program
	523.11	Penyuluhan
	523.12	Teknologi
	523.2	Produksi Perikanan
	523.21	Pelelangan
	523.22	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
	523.23	Perikanan budidaya
	523.24	Sertifikasi kesehatan ikan
	523.3	Usaha Perikanan
	523.31	Pembibitan
	523.32	Daerah Penangkapan
	523.33	Perizinan Pembudidayaan Ikan
	523.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
	523.41	Eksport Komoditas Perikanan
	523.42	Impor Komoditas Perikanan
	523.5	Sarana Prasarana Perikanan
	523.51	Peralatan : Kapal / perahu, jaring, dll.
	523.52	TPI / PPI
	523.53	Pelabuhan
	523.54	Kesyahbandaran
	523.6	Pengendalian Hama dan Penyakit
	523.61	Penyakit ikan
	523.62	Hama ikan
	523.63	Obat-obatan
	523.64	Kesehatan Lingkungan
	523.65	Konservasi Perairan Darat
	523.7	Pengusaha, Nelayan
	523.8	Konservasi dan Suaka Laut
	524	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	524.1	Produksi
	524.11	Perbibitan
	524.12	Penyebaran dan pengembangan peternakan
	524.13	Budidaya
	524.2	Usaha peternakan
	524.21	Pelayanan usaha

	524.22	Pengolahan hasil dan pemasaran
	524.23	Pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan
	524.3	Kesehatan hewan
	524.31	Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan
	524.32	Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
	524.33	Obat-obat hewan
	524.34	Pelayanan kesehatan hewan
	524.4	Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
	524.41	Zoonosis dan kesejahteraan hewan
	524.42	Hygieni dan sanitasi
	524.43	Produk hewani
	524.5	Laboratorium kesehatan hewan
	524.51	Pengujian mutu asal hewan
	524.52	Pengujian mutu produk bahan asal hewan
	524.53	Pengujian sampel penyakit
	524.6	Inseminasi buatan
	524.61	Produksi distribusi dan pemasaran
	524.62	Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi
	524.7	Pembibitan dan budi daya ternak
	525	PERKEBUNAN
	525.1	Program dan pelaporan
	525.11	Pelaporan
	525.12	Monitoring
	525.13	Statistik perkebunan
	525.2	Produksi
	525.21	Karet
	525.22	T e h
	525.23	Tembakau
	525.24	T e b u
	525.25	Cengkeh
	525.26	Kelapa, kopra, kelapa sawit
	525.27	Kopi
	525.28	Kakao
	525.23	Jenis tanaman yang lain
	525.3	Usaha Perkebunan
	525.31	Benih
	525.32	Pembibitan
	525.33	Kelompok tani
	525.34	Kemitraan

	525.35	Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
	525.36	Pemasaran hasil perkebunan
	525.4	Perlindungan tanaman
	525.41	H a m a
	525.42	Pestisida
	525.43	Agensia pengendalian hayati
	525.5	Alat dan mesin perkebunan
	525.6	Pengolahan lahan
	525.61	Terasering
	525.7	Pemasyarakatan
	525.71	Penyuluhan
	525.72	Sosialisasi
	525.73	Informasi
	526	Ketahanan Pangan
	526.1	Program Bimbingan Massal
	526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
	526.21	Pembinaan Teknologi
	526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
	526.23	Kelembagaan
	526.3	Agribisnis
	526.31	Mutu Hasil
	526.32	Pengelolaan Hasil Pangan
	526.33	Pemasaran Hasil
	526.34	Kemitraan
	526.4	Distribusi Pangan
	526.41	Sistem dan Pola Distribusi
	526.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
	526.43	Pengadaan dan cadangan Pangan
	526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
	526.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
	526.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
	526.53	Sistem Informasi Pangan
	527	<i>PENYULUHAN</i>
	527.1	Sumber daya manusia
	527.2	Kelembagaan
	527.3	Penyelenggaraan penyuluhan
	530	<i>PERINDUSTRIAN</i>
	530.1	Undang-Undang Gangguan
	531	Industri Logam
	532	Industri Mesin / Elektronik

	533	Industri Kimia / Farmasi
	534	Industri Tekstil
	535	Industri Makanan / Minuman
	536	Aneka Industri / Perusahaan
	536.1	Home Industri
	536.2	Rekomendasi Proposal
	536.3	Surat Keterangan Industri Kecil
	537	Aneka Kerajinan
	537.1	Kerajinan rakyat
	539	Perusahaan Daerah
	540	<i>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</i>
	541	Minyak dan gas bumi
	541.1	Pengusahaan
	541.2	Penyaluran
	541.3	Tangki, Pompa, Tangker
	542	Gas Bumi
	543	Logam Mulia seperti : Intan, emas, perak
	544	L o g a m
	545	Aneka Tambang / bahan galian
	545.1	Air Permukaan
	545.2	Air Bawah Tanah
	545.21	Perijinan
	545.22	Sumur pantau
	545.23	Pemasangan / Penyelengan Water Meter
	545.24	Produksi / Nilai Perolehan Air (NPA)
	545.25	Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan
	546	Geologi
	546.1	Pemetaan
	546.2	Mitigasi bencana geologi
	546.3	Vulkanologi
	546.4	Sumber Daya Mineral
	546.5	Hidrogeologi
	546.6	Gerakan Tanah (Longsoran, Amblesan)
	546.7	Pengawasan, Pengendalian
	547	Hidrologi
	548	Kesamudraan
	550	<i>PERHUBUNGAN</i>
	551	Perhubungan Darat
	551.1	Lalu lintas jalan raya, sungai, danau
	551.11	Keamanan lalu lintas, rambu-rambu

	551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
	551.13	Kecelakaan Lalu Lintas
	551.2	Angkutan jalan raya
	551.21	Perizinan
	551.22	Terminal
	551.23	Alat Angkutan
	551.24	Jembatan Timbang / Lebih Muatan
	551.25	Uji Mutu
	551.3	Angkutan sungai
	551.4	Angkutan danau
	551.5	F e r i
	551.6	Perkereta – apian
	551.61	Sarana meliputi : Lokomotif, Gerbong, Bogie
	551.62	Prasarana (Jalan/Jembatan)
	551.63	Trayek
	551.64	Angkutan Penumpang
	551.65	Angkutan Barang
	551.66	Keselamatan
	551.67	Kecelakaan
	551.68	Perawatan / Perbaikan
	551.69	Perizinan
	551.70	Jadwal Perjalanan
	552	Perhubungan Laut
	552.1	Lalu lintas angkutan laut
	552.2	Perkapalan – alat angkutan
	552.3	Pelabuhan
	552.4	Pengerukan / Perawatan
	552.5	Penjagaan Pantai
	552.6	Angkutan Barang
	552.7	Keselamatan
	552.8	Kecelakaan Gangguan
	552.9	Perijinan
	553	Perhubungan Udara
	553.1	Lalu lintas angkutan udara
	553.2	Pelabuhan Udara
	553.3	Alat angkutan
	553.4	Angkutan Barang
	553.5	Sertifikasi Kelaikan
	553.6	Keselamatan
	553.7	Kecelakaan / Gangguan

	553.8	Umum
	553.9	Perizinan
	554	P O S
	554.1	Pembinaan
	554.2	Pelayanan
	554.21	Jasa Pos
	554.22	Jasa Titipan
	554.23	Jasa Giro
	554.24	Benda Pos /Perangko
	554.25	Sampul Peringatan
	554.26	Jasa Pos Elektronik
	554.3	Perijinan
	554.31	Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
	554.32	Pembukaan Agen / Cabang
	554.4	Gangguan sarana dan prasarana
	555	TELEKOMUNIKASI
	555.1	Kebijakan
	555.2	Peralatan
	555.21	Telepon
	555.22	Telegram, Telex / SBB, Faximile
	555.23	Satelit, Internet
	555.24	Stasiun Bumi, Parabola
	555.25	Radio Komunikasi
	555.3	Sistem
	555.4	Pembinaan, penertiban
	555.5	Perijinan
	556	PARIWISATA DAN REKREASI
	556.1	Usaha Pariwisata
	556.11	Usaha Jasa Pariwisata : Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata
	556.12	Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
	556.13	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
	556.14	Usaha Sarana Pariwisata
	556.141	Ijin Pariwisata
	556.142	Ijin Usaha Pariwisata
	556.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
	556.144	Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik wisata
	556.145	Ijin Usaha Sarana
	556.15	Wisatawan
	556.151	Wisatawan Nusantara

	556.152	Wisatawan Mancanegara
	556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
	556.161	Dalam Negeri
	556.162	Luar Negeri
	556.2	Perhotelan
	556.21	Status Hotel
	556.22	Kelas Hotel
	556.23	Tarif
	556.3	Travel service
	556.31	Pramu Wisata
	556.32	Biro Perjalanan/Angkutan Wisata
	556.33	Souvenir
	556.34	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
	556.4	Tempat Rekreasi
	556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
	556.411	Ciptaan Tuhan
	556.412	Hasil Karya Manusia
	556.42	Rehabilitasi/Perawatan
	556.43	Pengembangan Fasilitas
	556.44	Tanah/Bangunan
	556.45	Bina Usaha
	556.46	Institusi
	556.461	Asosiasi
	556.462	Lembaga Kepariwisata
	556.5	Hiburan
	557	METEOROLOGI
	557.1	Curah hujan
	557.2	Hujan buatan
	557.3	Ramalan cuaca
	557.4	Peneropongan bintang
	560	TENAGA KERJA
	560.1	Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri
	560.11	Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah
	560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
	560.3	Rekrutmen Calon TKI/TKW
	560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
	560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
	560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW
	560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
	560.5	Persyaratan Naker TKI/TKW Ke Luar Negeri

	560.51	Permohonan Rekomendasi Pasport
	560.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW
	560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
	560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
	560.55	Pelatihan TKI/TKW
	560.6	Pemberangkatan Naker
	560.61	Pemberangkatan Ke Luar Negeri
	560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri
	560.63	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
	560.7	Pemulangan Naker
	560.71	Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya habis
	560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal
	560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
	561	U p a h
	561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
	561.2	Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabulapen/Kota dan Provinsi
	561.3	Kebutuhan Fisik Minimum
	561.4	Perhitungan Upah Kerja (Termasuk upah lembur)
	561.5	laporan Data Remittance
	561.6	Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
	562	Penempatan Tenaga Kerja
	562.1	Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
	562.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
	562.12	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional (termasuk didalamnya penempatan pekerja anak)
	562.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja (termasuk didalamnya penempatan pekerja cacat)
	562.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
	562.3	Lembaga Penyalur Naker
	562.31	Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal /Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
	562.32	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
	562.33	Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
	563	Latihan Kerja
	563.1	Pendidikan Pekerja
	563.11	Pendidikan Latihan Kerja
	563.12	Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)

	563.13	Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan, OJT)
	563.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
	563.21	Tempat Pelatihan Kerja (BLK)
	563.22	Instruktur / Pelatih
	563.23	Modul/Silabus dan Bahan Praktek
	563.24	Kurikulum dan Metode Pengajaran
	563.25	Sertifikat
	563.3	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
	564	Tenaga Sukarela
	564.1	Butsi
	564.2	Padat Karya
	565	Perselisihan Pekerja
	565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
	565.11	Pengaduan Perkara Pekerja / Naker (termasuk didalamnya pendaftaran/pencabutan perkara)
	565.12	Pemeriksaan Perkara Perburuhan / Naker
	565.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan / Naker
	565.14	Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan / Naker (termasuk didalamnya jadwal, tempat pelaksanaan sidang dan pemanggilan yang berperkara)
	565.15	Hasil Keputusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan (Naker)
	565.16	Peninjauan kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D / P4P)
	565.17	Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K(P4D / P4P)
	565.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D / P4P)
	565.2	Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
	566	Keselamatan Kerja
	566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
	566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
	566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
	566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	566.5	Pelatihan / Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
	566.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
	566.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
	566.8	Perlengkapan Sarana Kerja
	566.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat angkat/angkut)

	566.82	Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (Ketel Uap)
	566.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
	566.84	Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan
	566.85	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
	566.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (shift malam)
	567	Pemutusan Hubungan Kerja
	567.1	Pengaduan PHK Sepihak
	567.2	PHK Masal
	567.3	Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK
	567.4	Ijin Melakukan PHK
	567.5	Perhitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang di PHK
	567.6	Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja yang di PHK
	567.7	Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja yang di PHK
	568	Kesejahteraan Pekerja
	568.1	Bantuan Kredit / Bantuan Modal Kerja Bagi Naker
	568.11	Pemilihan Pekerja Teladan
	568.2	Perumahan Pekerja
	568.3	Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
	568.4	Koperasi Pekerja
	568.5	Sarana Transportasi Pekerja
	568.6	Perpustakaan Pekerja
	568.7	Tempat Ibadah Pekerja
	568.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
	568.9	Pendirian, pendaftaran dan kegiatan Organisasi Pekerja
	568.91	Lembaga Kerjasama Bipartid
	569	Tenaga Kerja Orang Asing
	569.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
	569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
	569.4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
	569.5	Data Tenaga Kerja Asing
	569.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing, Perselisihan Kerja dan Pengaduan Tenaga Kerja Asing
	569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
	569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
	569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
	570	PENANAMAN MODAL
	571	Modal Domestik
	571.1	Kerjasama Penanaman Modal Antar Provinsi
	571.2	Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten

	572	Modal Asing
	573	Modal Patungan (Joint Venture) / Penyertaan Modal
	574	Pasar uang dan modal
	575	S a h a m
	576	Perizinan (izin usaha, izin prinsip)
	580	<i>PERBANKAN MONETER</i>
	581	K r e d i t
	582	Investasi
	583	Tabungan
	583.1	Deposito
	584	Bank Pembangunan Daerah, termasuk BPD, BPR, BKK, Bank Pasar.
	585	Asuransi
	585.1	Dana Kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja)
	585.2	Polis
	585.3	Premi
	585.4	Tertanggung/pemegang polis
	585.5	Uang Pertanggungan
	585.6	Jiwa
	585.7	Kebakaran
	585.8	Pendidikan
	586	Alat Pembayaran meliputi : Cek, giro wesel, transfer
	587	Fiscal
	588	Hutang Negara
	589	Moneter
	590	<i>AGRARIA</i>
	590.1	Harga Dasar Tanah
	591	Tata Guna Tanah
	591.1	Pemetaan dan Pengukuran
	591.2	Perpetaan
	591.3	Penyediaan data, peta dan publikasi
	591.4	Fakta tata guna tanah
	591.5	Tanah Kritis
	592	Landreform
	592.1	Redistribusi
	592.11	Pendaftaran pemilikan tanah dan pengurusan tanah pertanian
	592.12	Penentuan tanah objek landreform
	592.13	Pembagian tanah objek landreform
	592.14	Sengketa redistribusi tanah objek landreform

	592.2	Ganti rugi
	592.21	Ganti rugi tanah kelebihan
	592.22	Sengketa ganti rugi tanah kelebihan
	592.23	Ganti rugi tanah absentee
	592.24	Sengketa ganti rugi tanah absentee
	592.25	Ganti rugi tanah partikelir
	592.26	Sengketa ganti rugi tanah partikelir
	592.3	Bagi hasil
	592.31	Penetapan imbalan bagi hasil
	592.32	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
	592.33	Sengketa perjanjian bagi hasil
	592.4	Gadai Tanah
	592.41	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah
	592.42	Pelaksanaan gadai tanah
	592.43	Sengketa gadai tanah
	592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
	592.6	Pengembangan
	592.7	Yayasan Dana Landreform
	593	Pengurusan hak - hak tanah
	593.1	Penyusunan program dan bimbingan teknis
	593.11	Sewa tanah
	593.12	Sewa tanah untuk tanaman tertentu : tebu, tembakau, rosela, corchorus
	593.2	Hak milik
	593.21	Perorangan
	593.22	Badan Hukum
	593.3	Hak pakai
	593.31	Perorangan
	593.311	Warga Negara Indonesia
	593.312	Warga Negara Asing
	593.32	Badan Hukum
	593.321	Badan Hukum Indonesia
	593.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang asing
	593.33	Tanah gedung-gedung negeri
	593.4	Guna usaha
	593.41	Perkebunan besar
	593.42	Perkebunan rakyat
	593.43	Peternakan
	593.44	Perikanan
	593.45	Kehutanan

	593.5	Hak guna bangunan
	593.51	Perorangan
	593.52	Badan hukum
	593.53	P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
	593.54	Badan hukum asing Belanda – PBK No. 5/56
	593.55	Pemulihan hak (Pen Pres 4 / 1960)
	593.6	Hak Pengelolaan
	593.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
	593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
	593.7	Sengketa tanah
	593.71	Peradilan perkara tanah
	593.8	Pencabutan dan pembebasan tanah
	593.81	Pencabutan hak
	593.82	Pembebasan Tanah
	593.83	Ganti rugi tanah
	594	Pendaftaran tanah
	594.1	Pengukuran / pemetaan
	594.11	Fotogrametri
	594.12	Terristis
	594.13	Triangulasi
	594.14	Peralatan
	594.2	Dana pengukuran
	594.3	Sertifikat
	594.4	Penjabat Pembuat Akte Tanah
	595	Transmigrasi
	595.1	Tata guna tanah
	595.2	Landreform
	595.3	Pengurusan Hak – Hak Tanah
	595.4	Pendaftaran Tanah
NO	KODE	KLASIFIKASI
7.	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
	601	Tata bangunan konstruksi, industri konstruksi
	602	Prakualifikasi
	602.1	Daftar Rekanan Mampu (DRM)
	602.2	Tanda Daftar Rekanan (TDR)
	602.3	Kontraktor, pemborong
	602.4	Tender
	602.5	Penunjukan
	602.51	Penunjukan Langsung

	603	Arsitektur
	604	Bahan bangunan
	604.1	Tanah dan batu seperti : batu belah, steen slaag, split dsb.
	604.2	Aspal, meliputi aspal buatan, aspal alam (Butas)
	604.3	Besi dan logam lainnya
	604.31	Besi beton
	604.32	Besi Profil (Konstruksi)
	604.33	Paku
	604.34	Aluminium Profil
	604.4	Bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat, Tech oil, Pengawetkayu)
	604.5	Semen
	604.6	Kayu, seperti : balok, papan, dolken, plywood, gabus dsb.
	604.7	Bahan penutup atap (genting, asbes gelombang, seng dan sebagainya)
	604.8	Alat penggantung dan pengunci
	604.9	Bahan-bahan bangunan lainnya
	605	Instalasi
	605.1	Instalasi bangunan
	605.2	Instalasi listrik
	605.3	Instalasi air / sanitasi
	605.4	Instalasi pengatur udara
	605.5	Instalasi akustik
	605.6	Instalasi cahaya/penerangan
	606	Konstruksi Pencegahan
	606.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
	606.2	Konstruksi pencegahan terhadap gempa
	606.3	Konstruksi pencegahan terhadap angin/udara/panas
	606.4	Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan
	606.5	Konstruksi pencegahan terhadap gas/eksplosive
	606.6	Konstruksi pencegahan terhadap serangga
	606.7	Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom
	607	Macam Konstruksi
	610	PENGAIRAN
	611	Irigasi
	611.1	Bangunan waduk
	611.11	Bendungan
	611.12	Tanggul
	611.13	Pelimpahan banjir
	611.14	Menara pengambilan
	611.15	Pembangunan Dermaga
	611.2	Bangunan Pengambilan

	611.21	Bendungan
	611.22	Bendungan dengan pintu bilas
	611.23	Bendungan dengan pintu pompa
	611.24	Pengambilan bebas
	611.25	Pengambilan bebas dengan pompa
	611.26	Sumur dengan pompa
	611.27	Kantung lumpur
	611.28	Silf Ekstretor
	611.29	Escope Chanel
	611.3	Bangunan Pembawa
	611.31	Saluran
	611.311	Saluran induk
	611.312	Saluran sekunder
	611.313	Suplesi
	611.314	Tersier
	611.315	Saluran Kwarter
	611.316	Saluran Pasangan
	611.317	Saluran tertutup/terowongan
	611.32	Bangunan
	611.321	Bangunan bagi
	611.322	Bangunan bagi dan sadap
	611.323	Bangunan sadap
	611.324	Bangunan check
	611.325	Bangunan terjun
	611.33	Box Tersier
	611.34	Got miring
	611.35	Talang
	611.36	Shypon
	611.37	Gorong-gorong
	611.38	Pelimpahan samping
	611.4	Bangunan Pembuang
	611.41	Saluran
	611.411	Saluran Pembuang Induk
	611.412	Saluran Pembuang Sekunder
	611.413	Saluran Pembuang Tersier
	611.42	Bangunan
	611.421	Bangunan out let
	611.422	Bangunan terjun
	611.423	Bangunan penahan banjir
	611.43	Gorong – gorong pembuang
	611.44	Talang Pembuang
	611.45	Sypon Pembuang

	611.5	Bangunan lainnya
	611.51	Jalan
	611.511	Jalan Inspeksi
	611.512	Jalan Logistik
	611.52	Jembatan
	611.521	Jembatan Inspeksi
	611.522	Jembatan Hewan
	611.53	Tangga Cuci
	611.54	Kubangan kerbau
	611.55	Waduk lapangan
	611.56	Bangunan penunjang
	611.57	Jaringan telepon
	611.58	Stasiun Agro
	611.59	Bangunan TPI dan Pasar Ikan
	612	Polder
	612.1	Tanggul keliling
	612.11	Tanggul
	612.12	Bangunan Penutup Sungai
	612.13	Jembatan
	612.2	Bangunan Pembawa
	612.21	Saluran
	612.211	Saluran muka
	612.212	Saluran pembawa induk
	612.213	Saluran pembawa sekunder
	612.214	Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
	612.22	Bangunan bagi
	612.221	Gorong-gorong
	612.222	Sypon
	612.3	Bangunan Pembuang
	612.31	Stasiun Pompa Pembuangan
	612.32	Saluran
	612.321	Saluran Pembuangan Induk
	612.322	Saluran Pembuangan Sekunder
	612.33	Pintu Air Pembuangan
	612.34	Gorong-gorong Pembuangan
	612.35	Sypon Pembuangan
	612.4	Bangunan Lainnya
	612.41	Bangunan Pengukur Air
	612.42	Bangunan Pengukur Curah Hujan
	612.43	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
	612.44	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
	612.5	Rumah Petugas Eksploitasi

	613	Pasang surut
	613.1	Bangunan Pembawa
	613.11	Saluran
	613.111	Saluran Pembawa Induk
	613.112	Saluran Pembawa Sekunder
	613.113	Saluran Pembawa Tersier
	613.114	Saluran Penyimpan Air
	613.115	Bangunan Pintu Pemasukan
	613.2	Bangunan Pembuang
	613.21	Saluran
	613.211	Saluran Pembuang Induk
	613.212	Saluran Pembuang Sekunder
	613.213	Saluran Pembuang Tersier
	613.214	Saluran Penyimpanan Air
	613.215	Bangunan Pintu Pembuangan
	613.3	Bangunan Lainnya
	613.31	Kolam Pasang
	613.32	Saluran
	613.321	Saluran lalu-lintas
	613.322	Saluran muka
	613.33	Bangunan
	613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
	613.332	Bangunan Pengukur Muka Air
	613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
	613.34	Jalan
	613.35	Jembatan
	614	Pengendalian Sungai
	614.1	Bangunan Pengaman
	614.11	Tanggul Banjir
	614.12	Pintu Pengatur Banjir
	614.13	Klep Pengatur Banjir
	614.14	Tembok Pengaman Talud
	614.15	Krib
	614.16	Kantung Lumpur
	614.17	Chek Dam
	614.18	Syphon
	614.2	Saluran Pengaman
	614.21	Saluran Banjir
	614.22	Saluran drainase
	614.23	Corepure
	614.3	Bangunan Lainnya
	614.31	Warning Sistem

	614.32	Stasiun
	614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
	614.322	Stasiun Pengukur Air
	614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
	614.324	Stasiun Pos Penjagaan
	615	Pengaman Pantai
	615.1	Tanggul
	615.2	K r i b
	615.3	Bangunan lainnya
	616	Air Tanah
	616.1	Stasiun Pompa
	616.2	Bangunan Pembawa
	616.3	Bangunan Pembuang
	616.4	Bangunan Lainnya
	620	J A L A N
	621	Jalan Kabupaten / Kota
	621.1	Daerah Penguasaan
	621.11	Tanah
	621.12	Tanaman
	621.13	Bangunan
	621.2	Bangunan Sementara
	621.21	Jalan Sementara
	621.22	Kantor Proyek
	621.23	Gudang Proyek
	621.24	Barak Kerja
	621.25	Laboratorium Lapangan
	621.26	Rumah
	621.3	Badan Jalan
	621.31	Pekerjaan Tanah (earth work)
	621.32	Stabilisasi
	621.4	Perkerasan
	621.41	Lapisan Pondasi Bawah
	621.42	Lapisan Pondasi
	621.43	Lapisan Permukaan
	621.5	Drainage
	621.51	Parit Tanah
	621.52	Gorong-gorong (culvert)
	621.6	Buku Trotoir
	621.61	Tanah
	621.62	Perkerasan
	621.63	Pasangan
	621.7	Median

	621.71	Tanah
	621.72	Tanaman
	621.73	Perkerasan
	621.74	Pasangan
	621.8	Daerah Sampingan
	621.81	Tanaman
	621.82	Pagar
	621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengaman
	621.91	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
	621.92	Lampu penerangan
	621.93	Lampu Pengatur lalu lintas
	621.94	Patok – patok KM
	621.95	Patok – patok R.O.W (Sempadan)
	621.96	Rel Pengaman
	621.97	Pagar
	621.98	Turap Panahan
	621.99	Bronjong
	622	Jalan Provinsi
	622.1	Daerah Penguasaan
	622.11	Tanah
	622.12	Tanaman
	622.13	Bangunan
	622.14	Jalan Sementara
	622.15	Jembatan sementara
	622.16	Kantor / Gudang Proyek
	622.17	Barak Kerja
	622.18	Laboratorium lapangan
	622.19	Rumah
	622.2	Badan Jalan
	622.21	Pekerjaan Tanah (earth work)
	622.22	Stabilisasi
	622.3	Perkerasan
	622.31	Lapis Pondasi Bawah
	622.3	Lapis Pondasi
	622.33	Lapis Permukaan
	622.4	Drainage
	622.41	Parit
	622.42	Gorong-gorong (culvert)
	622.4	Buku Trotoir
	622.44	Tanah
	622.45	Perkerasan
	622.5	Trotoir
	622.51	Tanah

	622.5	Perkerasan
	622.6	Median
	622.61	Tanah
	622.62	Tanaman
	622.63	Perkerasan
	622.64	Pasangan
	622.7	Daerah Samping
	622.71	Tanaman
	622.72	Pagar
	622.8	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
	622.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
	622.82	Lampu penerangan
	622.83	Lampu Pengatur lalu lintas
	622.84	Patok – patok KM
	622.85	Patok – patok R.O.W (Sempadan)
	622.86	Rel Pengaman
	622.87	Pagar
	622.88	Turap Panahan
	622.89	Bronjong
	623	Jalan Nasional
	623.1	Daerah Penguasaan
	623.2	Badan Jalan
	623.3	Perkerasan
	623.4	Drainase
	623.5	Median
	623.6	Daerah samping
	623.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan
	624	Jalan Desa
	625	Jalan Lingkungan
	630	JEMBATAN
	631	Jembatan pada Jalan Kota / Kabupaten
	631.1	Daerah Penguasaan
	631.11	Tanah
	631.12	Tanaman
	631.13	Bangunan
	631.2	Bangunan Sementara
	631.21	Jalan Sementara
	631.22	Jembatan Sementara
	631.23	Kantor Proyek
	631.24	Gudang Proyek
	631.25	Barak Kerja
	631.26	Laboratorium Lapangan
	631.27	Rumah

	631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
	631.31	Galian Tanah
	631.32	Timbunan Tanah
	631.4	Pondasi
	631.41	Pondasi Kepala Jembatan
	631.42	Pondasi Pilar
	631.43	Pondasi Angker
	631.5	Bangunan Bawah
	631.51	Kepala Jembatan
	631.52	Pilar
	631.53	Pilon
	631.54	Landasan
	631.6	Bangunan
	631.61	Gelagar
	631.62	Lantai
	631.63	Perkerasan
	631.64	Jalan Orang/Trotoar
	631.65	Sandaran
	631.66	Talang Air
	631.7	Bangunan Pengaman
	631.71	Turap/ Penahan
	631.72	Bronjong
	631.73	Strek Dam
	631.74	Kist Dam
	631.75	Coupute
	631.76	Krib
	631.8	Bangunan Pelengkap
	631.81	Rambu-rambu/ Tanda-tanda Lalu Lintas
	631.82	Patok Pengaman
	631.83	Patok-Patok ROW (Sempadan)
	631.9	Oprit
	631.91	Badan
	631.92	Perkerasan
	631.93	Drainage
	631.94	Baku
	631.95	Median
	632	Jembatan pada Jalan Provinsi
	632.1	Daerah Penguasaan
	632.11	Tanah
	632.12	Tanaman
	632.13	Bangunan
	632.2	Bangunan Sementara

	632.21	Jalan Sementara
	632.22	Jembatan Sementara
	632.23	Kantor Proyek
	632.24	Gudang Proyek
	632.25	Barak Kerja
	632.26	Laboratorium Lapangan
	632.27	Rumah
	632.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
	632.31	Galian Tanah
	632.32	Timbunan Tanah
	632.4	Pondasi
	632.41	Pondasi Kepala Jembatan
	632.42	Pondasi Pilar
	632.43	Pondasi Angker
	632.5	Bangunan Bawah
	632.51	Kepala Jembatan
	632.52	Pilar
	632.53	Pilon
	632.54	Landasan
	632.6	Bangunan
	632.61	Gelagar
	632.62	Lantai
	632.63	Perkerasan
	632.64	Jalan Orang/Trotoar
	632.65	Sandaran
	632.66	Talang Air
	632.7	Bangunan Pengaman
	632.71	Turap/ Penahan
	632.72	Bronjong
	632.73	Strek Dam
	632.74	Kist Dam
	632.75	Coupute
	632.76	Krib
	632.8	Bangunan Pelengkap
	632.81	Rambu-rambu/ Tanda-tanda Lalu Lintas
	632.82	Patok Pengaman
	632.83	Patok-Patok ROW (Sempadan)
	632.9	Oprit
	632.91	Badan
	632.92	Perkerasan
	632.93	Drainage
	632.94	Baku

	632.95	Median
	633	Jembatan pada Jalan Nasional
	633.1	Daerah Penguasaan
	633.2	Bangunan Sementara
	633.3	Pondasi
	633.4	Bangunan bawah
	633.5	Bangunan pengamanan
	633.6	Bangunan pelengkap dan pengaman
	640	BANGUNAN
	641	Bangunan Pemerintah
	641.1	Gedung Pengadilan
	641.2	Rumah Pejabat Negara
	641.3	Gedung DPR
	641.4	Gedung Balai Kota
	641.5	Penjara
	641.6	Perkantoran
	642	Bangunan Pendidikan
	642.1	Taman Kanak-kanak
	642.2	SD dan Sekolah Menengah
	642.3	Perguruan Tinggi
	643	Bangunan Rekreasi
	643.1	Bangunan olah raga
	643.2	Gedung kesenian
	643.3	Gedung Pemancar
	644	Bangunan Perdagangan
	644.1	Pusat Perbelanjaan
	644.2	Gedung Perdagangan
	644.3	Bank
	644.4	Perkantoran
	645	Bangunan Pelayan Umum
	645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
	645.2	Rumah Sakit
	645.3	Bangunan Keagamaan
	646	Bangunan Peninggalan Sejarah
	646.1	Monumen
	646.2	Candi
	646.3	Keraton
	646.4	Rumah Tradisionil
	647	Bangunan Industri
	648	Bangunan Tempat Tinggal
	648.1	Rumah Perkotaan
	648.11	Inti / Sederhana

	648.12	Sedang / Mewah
	648.2	Rumah Pedesaan
	648.21	Rumah Contoh
	648.3	Real Estate
	648.31	Pengesahan Site Plan
	649	Elemen Bangunan
	649.1	Pondasi
	649.11	Diatas Tiang
	649.2	Dinding
	649.21	Penahan Beban
	649.22	Tidak Menahan Beban
	649.3	Atap
	649.31	Atap genteng
	649.32	Atap asbes
	649.33	Atap seng
	649.4	Lantai / Langit-langit
	649.41	Suspended
	649.42	Solit
	649.5	Pintu / Jendela
	649.51	Pintu Hermonik
	649.52	Pintu Biasa
	649.53	Pintu Sorong
	649.54	Jendela Kayu
	649.55	Jendela Sorong
	649.56	Jendela Vertikal
	650	TATA RUANG KOTA
	651	Daerah perdagangan/pelabuhan
	651.1	Daerah pusat perdagangan
	651.2	Daerah perkantoran
	652	Daerah pemerintahan
	653	Daerah perumahan (<i>site dan servei</i>)
	653.1	Kepadatan rendah (<i>low density</i>)
	653.2	Kepadatan tinggi (<i>high density</i>)
	654	Daerah Industri
	654.1	Industri berat
	654.2	Industri ringan
	654.3	Industri rumah (<i>home industry</i>)
	655	Daerah Rekreasi
	655.1	Taman Umum (Public Garden)
	655.2	Taman Bermain dan Olahraga (<i>Sport & Playing Fields</i>)
	655.3	Ruang terbuka umum (<i>Open Space</i>)
	655.4	Makam

	656	Transportasi (tata letak)
	656.1	Jaringan jalan
	656.11	Penerangan jalan
	656.2	Jaringan kereta api
	656.3	Jaringan sungai
	656.4	Jalur Sepeda
	657	<i>Assineering</i> /penghancur kotoran
	657.1	Saluran pengumpulan
	657.2	Instansi pengolahan
	657.21	Bangunan
	657.22	Bangunan penyaring
	657.23	Bangunan penghancur kotoran
	657.24	Bangunan pengendapan
	657.25	Bangunan pengering lumpur
	657.26	Unit Desinfektan
	657.27	Unit Perpompaan
	658	Kesehatan Lingkungan
	658.1	Persampahan
	658.11	Bangunan pengumpulan
	658.12	Bangunan pemusnahan
	658.2	Pengotoran udara
	658.3	Pengotoran air
	658.31	Air buangan industri
	658.4	Kegaduhan
	658.5	Kebersihan kota
	659	Dokumen Tata Ruang
	659.1	Keterangan Rencana Daerah / Advice Planning
	659.2	Penetapan Lokasi
	660	TATA LINGKUNGAN
	660.1	Lingkungan Hidup
	660.2	Kebersihan lingkungan
	660.3	Pencemaran
	660.31	Pencemaran air
	660.32	Pencemaran udara
	660.33	Pencemaran tanah
	660.34	Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), limbah beracun dan berbahaya (LB3) dan bahan perusak ozon (BPO)
	660.35	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
	660.36	Baku mutu lingkungan
	661	Kerusakan lingkungan
	662	Konservasi lingkungan
	662.1	Konservasi pesisir dan laut

	662.2	Konservasi sumber daya alam
	663	Penegakan hukum lingkungan
	664	Laboratorium lingkungan
	664.1	Air
	664.2	Udara
	664.3	Tanah
	665	Dokumen lingkungan dan perizinan
	665.1	Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
	665.2	UKL/UPL, SPPL
	665.3	Izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	666	Pengembangan teknologi lingkungan
	667	Pengembangan kapasitas lingkungan
	668	Pengamanan lingkungan
	670	KETENAGAAN
	671	L i s t r i k
	671.1	Kelistrikan
	671.11	Kelistrikan PLN
	671.12	Kelistrikan Non PLN
	671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
	671.21	PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air
	671.22	PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
	671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
	671.24	PLTM – Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
	671.25	PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
	671.26	PLTPB – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
	671.27	PLTU – Pembangkit Listrik Tenaga Uap
	671.3	Transmisi Tenaga Listrik
	671.31	Gardu Induk / Gardu Penghubung / Gardu Trafo
	671.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi
	671.33	Kabel Bawah Tanah
	671.4	Distribusi Tenaga Listrik
	671.41	Gardu Distribusi
	671.42	Tegangan Tinggi
	671.43	Tegangan Menengah
	671.44	Tegangan Rendah
	671.45	Jaringan Bawah Tanah
	671.5	Pengusahaan Listrik
	672.51	Sambungan Listrik
	671.52	Penjualan Tenaga Listrik
	671.53	Tarif Listrik
	671.6	Jaringan Listrik

	671.61	Pemeliharaan Jaringan
	671.62	Perluasan Jaringan
	672	Tenaga Air
	673	Tenaga Minyak
	674	Tenaga Gas
	675	Tenaga Matahari
	676	Tenaga Nuklir
	677	Tenaga Panas Bumi
	678	Tenaga Uap
	679	Tenaga Lainnya
	680	<i>PERALATAN PEKERJAAN UMUM</i>
		-
	690	<i>AIR MINUM</i>
	691	I n t a k o
	691.1	Bromcaptering
	691.2	S u m u r
	691.21	Sumur pompa
	691.22	Sumur Artetis
	691.3	Bendungan
	691.4	Saringan (Screen)
	691.5	Pintu Air
	691.6	Saluran Pembawa
	691.7	Alat Ukur
	691.8	Perpompaan
	692	Transmisi Air Baku
	692.1	Perpipaan
	692.2	Katup Udara (air relief)
	692.3	Katup Penguras (blow off)
	692.4	Bak Pelapas Tekanan
	692.5	Jembatan Pipa
	692.6	Syphon
	693	Instalasi Pengelolaan
	693.1	Bangunan Ukur
	693.2	Bangunan Aerasi
	693.3	Bangunan Pengendapan
	693.4	Bangunan Pembubuhan Bahan Kimia
	693.5	Bangunan Pengaduk
	693.6	Bangunan Saringan
	693.7	Perpompaan
	693.8	Clear Hell
	694	Distribusi

	694.1	Reservoir menara bawah tanah
	694.11	M e n a r a
	694.12	Reservoir dibawah tanah
	694.2	Perpipaan
	694.3	Perpompaan
	694.4	Jembatan Pipa
	694.5	Syphon
	694.6	Hydran
	694.61	Hydran umum
	694.62	Hydran kebakaran
	694.7	K a t u p
	694.71	Katup udara (air relief)
	694.72	Katup pelepas (blow off)
	694.8	Bak pelepas tekanan (pressure reducing valve)
	695	Tarif Air Minum

NO	KODE	KLASIFIKASI
8.	700	PENGAWASAN
	700.1	Kebijakan dan program pengawasan
	701	Pangawasan Perencanaan Pengadaan/Proyek
	702	Pengawasan Peralatan
	703	Pengawasan Kekayaan Daerah / Asset
	704	Pengawasan Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan
	705	Pengawasan Organisasi dan Ketatalaksanaan
	706	Pengawasan Penelitian/Riset
	707	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
	708	Pengawasan Pertanahan
	709	Pangawasan Perjalanan Dinas Pejabat/PNS
	710	BIDANG PEMERINTAHAN
	711	Pengawasan Pemerintahan Daerah Provinsi
	712	Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
	713	Pengawasan Pemerintahan Desa
	714	Pengawasan Hukum/ Konstitusi/ Peraturan Lain
	720	BIDANG POLITIK
	721	Pengawasan Partai, termasuk pendanaan, keanggotaan, atribut partai, dll.
	722	Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam
	723	Pegawasan Organisasi Kemasyarakatan / Keagamaan / Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
	724	Pengawasan Organisasi Profesi dan Fungsional

	725	Pengawasan Organisasi Kepemudaan/ Olahraga
	726	Pengawasan Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan
	727	Pengawasan Organisasi Wanita
	730	BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN
	731	Pengawasan Kesbangpolinmas
	732	Pengawasan pelaksanaan penanggulangan Bencana Alam / SAR
	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
	741	Pengawasan Pembangunan Desa
	742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
	743	Pengawasan Kebudayaan
	744	Pengawasan Kesehatan / Makanan/ Obat
	745	Pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras)
	746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
	747	Pengawasan Kependudukan, Migrasi/ Urbanisasi
	748	Pengawasan Media Massa, Kehumasan dan Penyiaran
	749	Pengawasan Bantuan/ Subsidi Masyarakat
	750	BIDANG PEREKONOMIAN
	751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
	752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
	753	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
	754	Pengawasan Perikanan
	755	Pengawasan Energi dan Sumber Daya Mineral
	756	Pengawasan Perhubungan
	757	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian
	758	Pengawasan Permodalan (PMDN / PMA)
	759	Pengawasan Perbankan / Moneter
	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
	761	Pengawasan Pengairan
	762	Pengawasan Jalan
	763	Pengawasan Jembatan
	764	Pengawasan Bangunan
	765	Pengawasan Tata Ruang Kota
	766	Pengawasan Tata Lingkungan
	767	Pengawasan Ketenagaan
	768	Pengawasan Air Minum
	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
	771	Penyimpangan Pejabat Publik
	772	Laporan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota

	780	BIDANG KEPEGAWAIAN
	781	Pengawasan Pengadaan PNS
	782	Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi Pegawai
	783	Pengawasan Kedudukan/ Jabatan PNS
	784	Penyimpangan Pejabat / PNS
	785	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
	786	Pengawasan Pemberhentian PNS
	787	Persengketaan PNS
	788	Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Parpol
	790	BIDANG KEUANGAN
	791	Pengawasan Anggaran
	792	Pengawasan Verifikasi
	793	Pengawasan Pembukuan / Akuntansi
	794	Pengawasan Perbendaharaan
	795	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
	796	Pengawasan Pendapatan
NO	KODE	KLASIFIKASI
9.	800	KEPEGAWAIAN
		Termasuk Kebijakan Kepegawaian
	801	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
	801.1	Analisis Jabatan
	801.2	Analisis Beban Kerja
	801.3	Peta Jabatan
	802	Penelitian
	802.1	Pengaduan
	802.2	Team
	802.3	Statistik
	803	Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
	803.1	Ijin melakukan perceraian
	803.2	Keterangan untuk melakukan perceraian
	803.3	Ijin untuk beristri lebih dari satu orang
	803.4	Laporan perceraian / perkawinan
	810	PENGADAAN
	811	Perencanaan
	811.1	Jadwal pengadaan PNS
	811.2	Prasarana dan sarana pengadaan PNS
	812	Pengumuman lowongan
	813	Lamaran
	814	Seleksi
	814.1	Seleksi administrasi

	814.2	Seleksi Kompetensi Dasar
	814.1	Seleksi Kompetensi Bidang
	815	Pengumuman hasil seleksi
	816	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
	816.1	Pengangkatan CPNS Golongan I
	816.2	Pengangkatan CPNS Golongan II
	816.3	Pengangkatan CPNS Golongan III
	817	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
	817.1	Pengangkatan PNS Golongan I
	817.2	Pengangkatan PNS Golongan II
	817.3	Pengangkatan PNS Golongan III
	818	Sumpah Janji
	819	Pengangkatan PPPK dan Tenaga Harian Lepas , Honoror.
	819.1	Pengangkatan PPPK
	819.2	Pengangkatan Tenaga Harian Lepas, Honoror
	820	MUTASI
	820.1	Mutasi dalam satu instansi
	820.11	Pelaksana
	820.12	Pengawas
	820.13	Administrator
	820.14	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
	820.15	Fungsional
	820.2	Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (semua golongan)
	820.3	Mutasi PNS antar Kabupaten/Kotadalam satu provinsi (semua golongan)
	820.4	Mutasi PNS Provinsi / Kabupaten/Kota ke instansi pusat atau sebaliknya (semua golongan)
	821	Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
	821.1	Pengangkatan dalam jabatan
	821.11	Pengangkatan Pelaksana
	821.12	Pengangkatan menjadi Pengawas
	821.13	Pengangkatan menjadi Administrator
	821.14	Pengangkatan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi
	821.2	Pemberhentian dalam jabatan
	821.21	Pemberhentian Pelaksana
	821.22	Pemberhentian Pengawas
	821.23	Pemberhentian Administrator
	821.24	Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi
	821.3	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
	821.31	Jabatan Pelaksana

	821.31	Jabatan Pengawas
	821.31	Jabatan Administrasi
	821.31	Jabatan Pimpinan Tinggi
	821.4	Berita Acara Serah Terima Jabatan
	821.5	Pernyataan Pelantikan
	821.6	Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, sumpah janji, pernyataan pelantikan
	821.61	Penetapan Angka Kredit
	821.62	Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
	821.63	Pelantikan dan pengambilan sumpah /janji
	821.64	Pernyataan pelantikan
	821.65	Kenaikan jabatan
	821.66	Pembebasan sementara
	821.67	Pemberhentian
	821.68	Pengangkatan kembali
	822	Kenaikan Gaji Berkala
	822.1	PNS golongan I
	822.2	PNS golongan II
	822.3	PNS golongan III
	822.4	PNS golongan IV
	823	Kenaikan Pangkat
	823.1	PNS golongan I
	823.2	PNS golongan II
	823.3	PNS golongan III
	823.4	PNS golongan IV
	824	Pemindahan/pelimpahan/pembantuan/alih kepegawain
	825	Datasering / penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu
	826	Ijin PNS mencalonkan diri menjadi Kades
	826.1	Keputusan pemberisn ijin
	826.2	Pembebasan sementara dari jabatan organik
	826.3	Pengangkatan kembali
	827	Menghadapkan PNS
	828	Surat pernyataan melaksanakan tugas
	830	KEDUDUKAN
	831	Penghitungan / Peninjauan masa kerja
	832	Penyesuaian/ inpassing pangkat / gaji
	832.1	Pegawai Golongan I
	832.2	Pegawai Golongan II
	832.3	Pegawai Golongan III
	832.4	Pegawai Golongan IV

	833	Ijin penggunaan gelar
	834	Penghargaan
	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
	841	Tunjangan
	841.1	Jabatan
	841.2	Tunjangan Hari Raya
	841.3	Tambahan Penghasilan / tunjangan kinerja dan yang sejenis
	841.4	Keluarga
	841.	Tunjangan lainnya
	842	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
	842.1	Taspen
	842.2	BPJS
	843	Perlindungan
	843.1	Jaminan kesehatan
	843.2	Jaminan kecelakaan kerja
	843.3	Jaminan kematian
	843.4	Bantuan Hukum
	844	Ijin PNS melaksanakan kegiatan usaha
	845	Perumahan
	845.1	Perumahan Pegawai
	845.2	Tanah Kapling ?
	846	Bantuan Sosial
	846.1	Bantuan Kebakaran
	846.2	Bantuan Kebanjiran
	847	Rekreasi
	848	Dispensasi
	850	CUTI
	851	Cuti tahunan
	852	Cuti besar
	853	Cuti sakit
	854	Cuti melahirkan
	855	Cuti karena alasan penting
	856	Cuti diluar tanggungan negara
	857	Cuti Bersama
	860	PENILAIAN
	861	Penghargaan
	861.1	Tanda Kehormatan
	861.2	Kenaikan Pangkat Istimewa
	861.3	Kesempatan prioritas pengembangan kompetensi
	861.4	Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan

	861.5	Pegawai Teladan / PNS berprestasi
	862	Hukuman disiplin
	862.1	Hukuman disiplin ringan
	862.11	Teguran lisan
	862.12	Teguran tertulis
	862.13	Pernyataan tidak puas secara tertulis
	862.2	Hukuman disiplin sedang
	862.21	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun
	862.22	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun
	862.23	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
	862.3	Hukuman disiplin berat
	862.31	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
	862.32	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
	862.33	Pembebasan dari jabatan
	862.34	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
	863	Penilaian Kinerja
	863.1	Pelaksana
	863.2	Pengawas, Administrator dan JPT
	863.3	Fungsional
	863.4	Tim Penilai Kinerja PNS
	864	Ujian Dinas
	864.1	Tingkat I
	864.2	Tingkat II
	864.3	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
	865	Penilaian kehidupan pegawai negeri Meliputi : Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P, LHKPN, LHKASN)
	866	Rehabilitasi
	867	GDN
	868	Proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran disiplin
	868.1	Surat panggilan
	868.2	Berita acara pemeriksaan
	868.3	Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin
	868.4	Laporan hasil pemeriksaan
	869	Uji Kompetensi
	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
	871	Formasi
	872	Bezetting (Daftar Urut Kepangkatan)
	873	Sistem Informasi Kepegawaian

	873.1	NIP
	873.2	KARPEG
	873.3	Legitimasi / tanda pengenal
	873.4	Daftar Keluarga
	873.5	KARIS/ KARSU
	874	Daftar Riwayat Pekerjaan
	874.1	Tanggal lahir
	874.2	Penggantian nama
	874.3	Organisasi
	875	Kewenangan mutasi kepegawaian
	875.1	Pelimpahan wewenang
	875.2	Specimen tanda tangan
	876	Penggajian
	876.1	SKPP
	877	Korps Kepegawaian
	880	PEMBERHENTIAN
	881	Pemberhentian atas permintaan sendiri
	882	Pemberhentian karena mencapai BUP
	882.1	PNS Golongan I
	882.2	PNS Golongan II
	882.3	PNS Golongan III
	882.4	PNS Golongan IV
	883	Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang
	884	Pemberhentian karena alasan lain :
	884.1	Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani
	884.2	Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah
	884.3	Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.
	884.4	Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik
	884.5	Pemberhentian karena melakukan tindak pidana / penyelewengan
	884.6	Pemberhentian karena pelanggaran disiplin
	886	Pemberhentian Sementara
	887	Pembekalan PNS yang akan purna tugas
	888	Masa Persiapan Pensiun (MPP)

	890	PENDIDIKAN PEGAWAI
	890.1	Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Diklat
	891	Pendidikan Pra Jabatan.
	892	Pendidikan Dalam Jabatan
	892.1	Diklatpim
	892.2	Diklat Teknis
	892.3	Diklat Fungsional
	893	Bimbingan Teknis, Kursus-kursus, penataran
	894	Pengembangan Pegawai
	894.1	Tugas Belajar
	894.2	Ijin Belajar
	894.3	Penempatan kembali
	895	Metode
	895.1	Kuliah
	895.2	Ceramah, simposium
	895.3	Diskusi, seminar, lokakarya, orientasi
	895.4	Kuliah lapangan / Orientasi Lapangan, widya wisata, KKN
	895.5	Kurikulum
	895.6	Karya Tulis, Proyek Perubahan (Proper)
	896	Tenaga pengajar, Widya Iswara, Nara sumber
	896.1	Usul menjadi Tenaga Pengajar
	896.2	Permintaan tenaga pengajar, nara sumber
	896.3	Penambahan tenaga pengajar
	897	Adiministrasi pendidikan
	897.1	Tahun Pelajaran
	897.2	Persyaratan, pendaftaran, testing, ujian
	897.3	STTP
	897.5	Laporan Pendidikan dan Pelatihan
	898	Fasilitas
	898.1	Tunjangan belajar
	898.2	Asrama
	898.3	Uang makan
	898.4	Uang transport
	898.5	Uang buku
	899	Sarana
	899.1	Persediaan Buku
	899.2	Gedung

NO	KODE	KLASIFIKASI
10.	900	KEUANGAN
	901	Nota Keuangan
	902	APBN
	903	APBD
	904	APBSekolah
	910	ANGGARAN
	911	Keputusan penunjukkan pengelola keuangan OPD
	912	KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
	913	Anggaran Belanja Tambahan
	914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)
	915	Daftar Isian Proyek (DIP)
	916	RKA (Rencana Kerja Anggaran)
	917	DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran)
	918	Belanja Tidak Langsung (Hibah Bansos, dll.)
	920	VERIFIKASI
	921	SPM Belanja Langsung
	922	SPM Belanja Tidak Langsung
	923	Penerimaan
	924	SPJ Belanja Langsung
	925	SPJ Belanja Tidak Langsung
	926	Nota Pemeriksaan
	927	SP Pemindahbukuan (SPPP)
	928	SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
	929	SPJ Subsidi
	930	PEMBUKUAN (AKUNTANSI)
	931	Penyusunan Perhitungan Anggaran
	932	Permintaan Data Anggaran
	933	Laporan Fisik Pembangunan
	934	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	935	Berita Acara Rekonsiliasi
	936	Cash opname
	940	PERBENDAHARAAN
	941	SPD (Surat Penyediaan Dana)
	942	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
	943	Daftar Penguji SP2D (Advis)
	944	Penggantian Bendahara Penerimaan / Pengeluaran
	945	Specimen tanda tangan
	946	Tuntutan Perbendaharaan

	950	PEMBINAAN PERBENDAHARAAN
	951	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
	952	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
	953	Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah
	954	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
	955	Kerjasama dengan Bank
	956	Urusan Rekening Daerah
	957	Deposito
	958	Giro
	960	PENGELOLAAN KAS DAERAH
	961	Laporan realisasi penerimaan daerah
	962	Laporan realisasi pengeluaran daerah
	964	Penerimaan Kas Non Anggaran (potongan Taspen, Askes, PPh, PPn, penerimaan lainnya yang sejenis)
	965	Pengeluaran Kas Non Anggaran (penyetoran Taspen, Askes, PPh, PPn, pengeluaran lainnya yang sejenis)
	970	PENDAPATAN
	971	Perimbangan Keuangan
	971.1	Bagi Hasil Pajak
	971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
	971.12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
	971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
	971.21	Pemberian Hak Atas Tanah
	971.22	Sumber Daya Hutan
	971.23	Sumber Daya Alam/ Migas
	972	Subsidi
	973	Pajak
	973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
	973.2	Pajak Kendaraan Diatas air
	973.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	973.4	Pajak Reklame
	973.5	Pajak Hotel
	973.6	Pajak Restoran
	973.7	Pajak Penerangan Jalan
	973.8	Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan ABT (Air Bawah Tanah)
	973.9	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP (Air Permukaan)
	973.10	Pajak lainnya
	974	Retribusi
	974.1	Retribusi bidang kesehatan
	974.2	Retribusi bidang seni, budaya dan pariwisata

974.3	Retribusi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar).
974.4	Retribusi bidang pertanian
974.5	Retribusi bidang perikanan dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)
974.6	Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan
974.7	Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir, dsb.)
974.8	Retribusi ijin pengambilan dan pemanfaatan ABT/ AP
974.9	Retribusi lainnya
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan Lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas
979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.21	Jasa Giro Kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang Kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan bunga bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan ganti rugi atas kerugian / kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR)
979.41	Sumbangan Pihak Ketiga
979.42	Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)
979.43	Sumbangan Pihak Ketiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-lain
979.51	Penerimaan kembali kredit BKK

	979.52	Ternak Tidak Layak Bibit
	979.53	Sewa Internet
	979.54	Penerimaan dari Dana Bergulir/ Revolving
	979.55	Kerjasama dengan BUMIDA
	979.56	Penerimaan DUKS
	979.57	Tempat Rekreasi
	979.58	Setoran TP-TGR
	979.59	Penerimaan Lainnya dari Setda / Dinas / Badan / Kantor dan Instansi Lainnya

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN